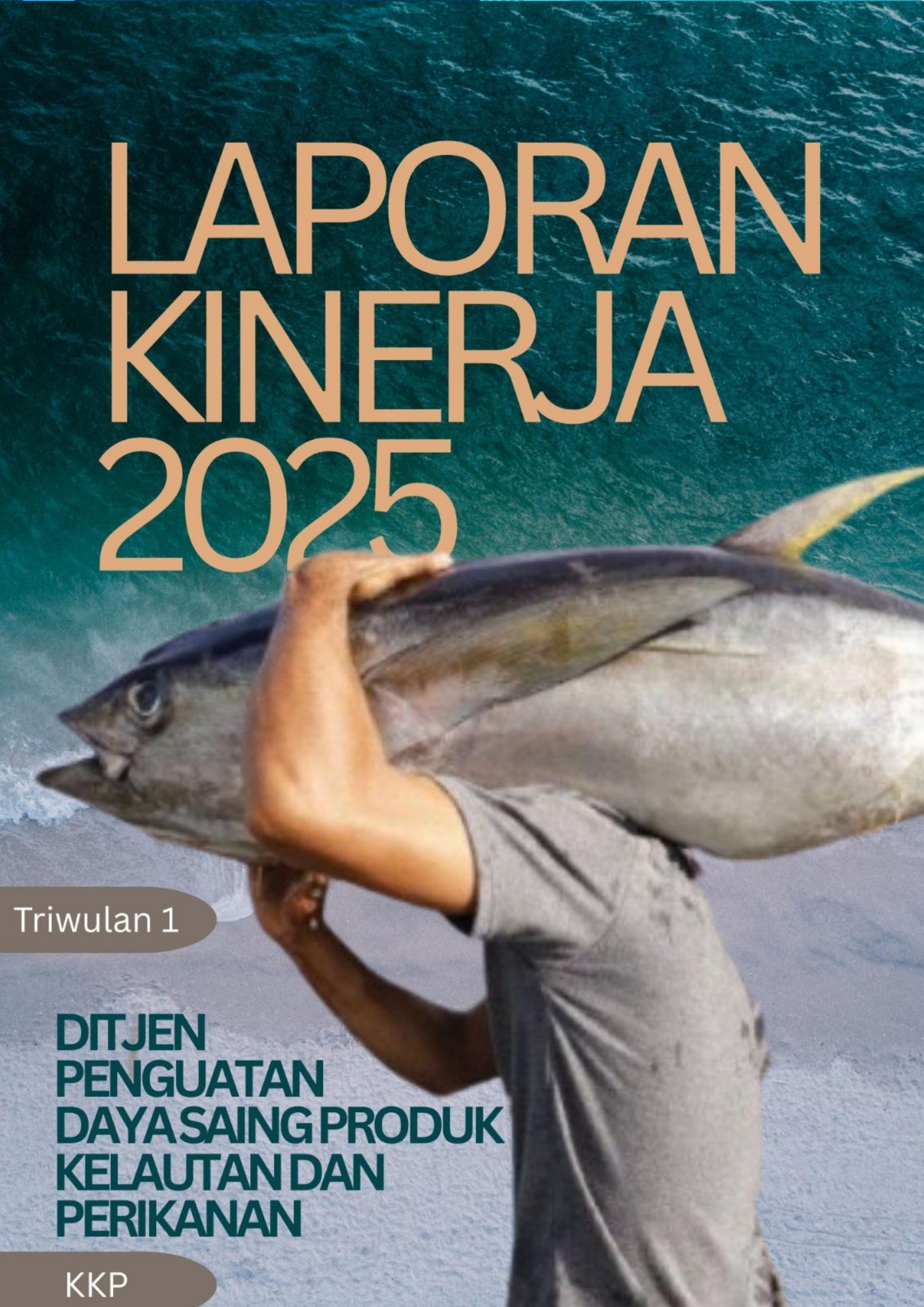


LAPORAN KINERJA 2025

A person is shown from the chest up, holding a large, silvery fish horizontally. The person is wearing a grey t-shirt. The background consists of a deep blue-green ocean with white-capped waves. The overall image has a professional, high-quality feel, likely intended for a corporate or institutional report.

Triwulan 1

**DITJEN
PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN
PERIKANAN**

KKP



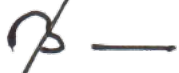
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai salah satu implementasi atas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru KKP, Ditjen PDSPKP memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP. Upaya memperkuat daya saing tersebut telah dijabarkan pada perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP, yang juga menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program. Secara garis besar pencapaian kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I tahun 2025 ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 77,97 (Kategori Cukup).

Akhir Kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang telah ditetapkan kepada kami. Dengan semangat internalisasi #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntabel dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 29 April 2025


Budi Sulistiyo

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Budi Sulistiyo

PENYUSUN

Machmud

Prayudi Budi Utomo

Agus Wijatmoko

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ayu Wahdania

Muqaromah Fitra Hasanah

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Berdasarkan PK tersebut, terdapat lima indikator kinerja yang terdiri dari dua Indikator yang periode pelaporannya bersifat triwulanan, satu bersifat semesteran, dan dua bersifat tahunan.

Sebanyak lima indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2025. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP periode triwulan I Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 77,97% (Kategori Cukup).

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Program Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dengan Indikator Kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar), Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar), Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun), Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)
2. Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP dengan Indikator Kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDPSKP (Nilai)
3. Dua indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat triwulanan yaitu Nilai Ekspor Rumput Laut dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya; satu indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat semesteran yaitu Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas; dan dua indikator kinerja yang periode pelaporannya bersifat tahunan yaitu Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri, dan Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP.

4. Indikator kinerja yang belum mencapai target pada triwulan I tahun 2025 yaitu Nilai Ekspor Rumput Laut dengan persentase capaian sebesar 50% dari target triwulan I sebesar 0,14 USD Miliar.
5. Indikator kinerja yang memiliki capaian melebihi target pada triwulan I Tahun 2025 adalah Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya dengan persentase capaian sebesar 105,93% dari target triwulan I sebesar 1,35 USD Miliar.
6. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp255.259.620.000,- yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNPB. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp142.079.145.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp113.180.475.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp27.851.059.725,- atau setara dengan 10,91% terhadap total pagu anggaran awal atau 24,61% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	1
DAFTAR LAMPIRAN	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1. Latar Belakang.....	5
2. Maksud dan Tujuan.....	6
3. Tugas dan Fungsi.....	6
4. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur	10
5. Permasalahan Utama	11
6. Sistematika Penyajian	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
1. Rancangan Rencana Strategis	21
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
1. Capaian Kinerja.....	27
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	28
3. Realisasi Anggaran.....	99
BAB IV PENUTUP	101
1. Kesimpulan.....	101
2. Permasalahan dan Rekomendasi.....	101
3. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024	103
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025	26
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2025	27
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut	29
Tabel 4. Nilai Ekspor Rumput Laut Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor..	29
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya	33
Tabel 6. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor.....	33
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri	47
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas Tahun 2024.....	73
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP	80
Tabel 10. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2024 (Dalam Rp.000).....	99
Tabel 11. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024 (Dalam Rp.000).....	100
Tabel 12. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada triwulan I Tahun 2025	102
Tabel 13. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP.....	8
Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP.....	10
Gambar 3. Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2025.....	10
Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025	20
Gambar 5. Dashboar Nilai Kinerja Organisasi PDSPKP	27
Gambar 6. Fasilitas Kerjasama Pemasaran Rumput Laut.....	31
Gambar 7. Rapat Identifikasi Kebutuhan SNI.....	36
Gambar 8. Rapat Tindak Lanjut Kaji Ulang SNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan NonPangan.....	36
Gambar 9. Refreshment Konseptor dan Editor RSNI 2025.....	37
Gambar 10. Rapat RSNI1 Komtek 65-05 Produk Perikanan	38
Gambar 11. Kegiatan Pembinaan Unit Pengolahan Ikan.....	39
Gambar 12. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SPP Seram Bagian Barat dan SPP Kota Banda Aceh.....	40
Gambar 13. Bimbingan Teknis Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.....	41
Gambar 14. Promosi Peluang Investasi Pengolahan Tuna Kabupaten Biak Numfor.....	42
Gambar 15. Koordinasi dan Sinergitas Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan dengan BKPM	43
Gambar 16. Kegiatan Sosialisasi Implementasi STELINA.....	45
Gambar 17. koordinasi penyiapan penguatan logistik ikan nasional	46
Gambar 18. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	48
Gambar 19. Dashboard Tools Pengolahan Data AKI.....	49
Gambar 20. Pelatihan pemasaran digital melalui platform Shopee	51
Gambar 21. Pembahasan Populasi UPI Menengah Besar Tahun 2025..	51
Gambar 22. Rapat Koordinasi Pendataan VPO Tahun 2025	53
Gambar 23. Rapat Koordinasi perencanaan dan persiapan awal penyediaan sarana pengolahan	55

Gambar 24. Webinar Ngolah ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa	57
Gambar 25. Sosialisasi Ragam Produk Olahan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	58
Gambar 26. Kegiatan Pengembangan Hidrolisat Protein Ikan	58
Gambar 27. Pilot Test Enzim HPI bersama PT. Brenntag dan BBP3KP .	59
Gambar 28. Kegiatan Penyusunan Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP	60
Gambar 29. Kegiatan penyiapan Bahan RSNI	61
Gambar 30. Dokumentasi sampel agar-agar kertas.....	62
Gambar 31. Surveilans produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng PT Artha Sumatera Abad	63
Gambar 32. Pengujian sensori tuna kaleng.....	64
Gambar 33. Gambar 33. Verifikasi metode pengujian Staphylococcus aureus.....	64
Gambar 34. Profiling kebutuhan pendampingan bagi 14 mitra UMKM Satker BBP3KP Palabuhanratu.....	65
Gambar 35. Sosialisasi kegiatan pendampingan penerapan pengembangan produk kelautan dan perikanan	66
Gambar 36. Rapat persiapan workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah tahun 2025.....	67
Gambar 37. Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Ikan yang Diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor.....	67
Gambar 38. Kunjungan ASPRINDO ke BBP3KP	68
Gambar 39. Peliputan dan konten media sosial terkait pelatihan fillet ikan nila dan lele	69
Gambar 40. Penyebarluasan informasi pada bazar produk perikanan dan kuliner bulan Januari	69
Gambar 41. Contoh konten media sosial.....	70
Gambar 42. Penyebarluasan informasi pada bazar produk perikanan dan kuliner bulan Februari	70
Gambar 43. Kegiatan tim pengelola perpustakaan BBP3KP.....	70

Gambar 44. Peliputan atau pengambilan gambar dalam rangka penyusunan bahan informasi	71
Gambar 45. Contoh Konten Media Sosial Maret 2025	71
Gambar 46. Webinar Series SNI Produk Perikanan: “SNI Didapat, UMKM Hebat”	71
Gambar 47. Penyebarluasan Informasi melalui Kampanye Protein Ikan di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Ciseeng, Bogor	72
Gambar 48. Tampilan SKM Digital pada LED Banner	72
Gambar 49. Rapat Verifikasi Kelengkapan Standar Usaha Pemasaran Ikan	74
Gambar 50. Penguatan kelembagaan pelaku usaha pengolahan ikan asin di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara pada tanggal 14 Maret 2025	78
Gambar 51. kegiatan Fasilitasi UMKM KP pada Akses Pembiayaan dan Kemitraan	79
Gambar 52. Sosialisasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	86
Gambar 53. Verifikasi penyerahan arsip statis sistem logistik ikan nasional	86
Gambar 54. Pelaksanaan dashboard kinerja kearsipan.....	86
Gambar 55. Rapat Pembahasan Metode Pendataan Satudata Bidang PDSPKP Pasca Efisiensi Anggaran, 24 Februari 2025	87
Gambar 56. Rapat Pembahasan Identifikasi Self-Assessment Efisiensi Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025	88
Gambar 57. Rapat Pembahasan Kegiatan Ditjen PDSPKP Pasca Efisiensi.....	89
Gambar 58. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2024	89
Gambar 59. Pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024...	90
Gambar 60. Pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2025	90
Gambar 61. Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP	91
Gambar 62. Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP	92

Gambar 63. Rapat Penyusunan Draft Laporan Kinerja (Lkj) Level 1 Lingkup Ditjen PDPSKP.....	92
Gambar 64. Kegiatan Pengisian Capaian Kinerja dan Anggaran Periode Triwulan IV Tahun 2024 pada Aplikasi Emonev Bappenas	93
Gambar 65. Kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Jenderal.....	93
Gambar 66. Rapat Pembahasan Piutang PT Perindo atas Pemanfaatan BMN PIM Muara Baru Bersama Biro Keuangan dan Inspektorat IV KKP.....	94
Gambar 67. Rapat Pembahasan Pemanfaatan BMN Cold storage Muara Baru bersama KPKNL Jkt II, Pengguna Barang KKP dan BBP3KP.....	95
Gambar 68. Finalisasi Updating RUP Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja	106
--------------------------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Rancangan Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Rancangan Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja,

pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan Rancangan Renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran program pada Triwulan I Tahun 2025 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

3. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

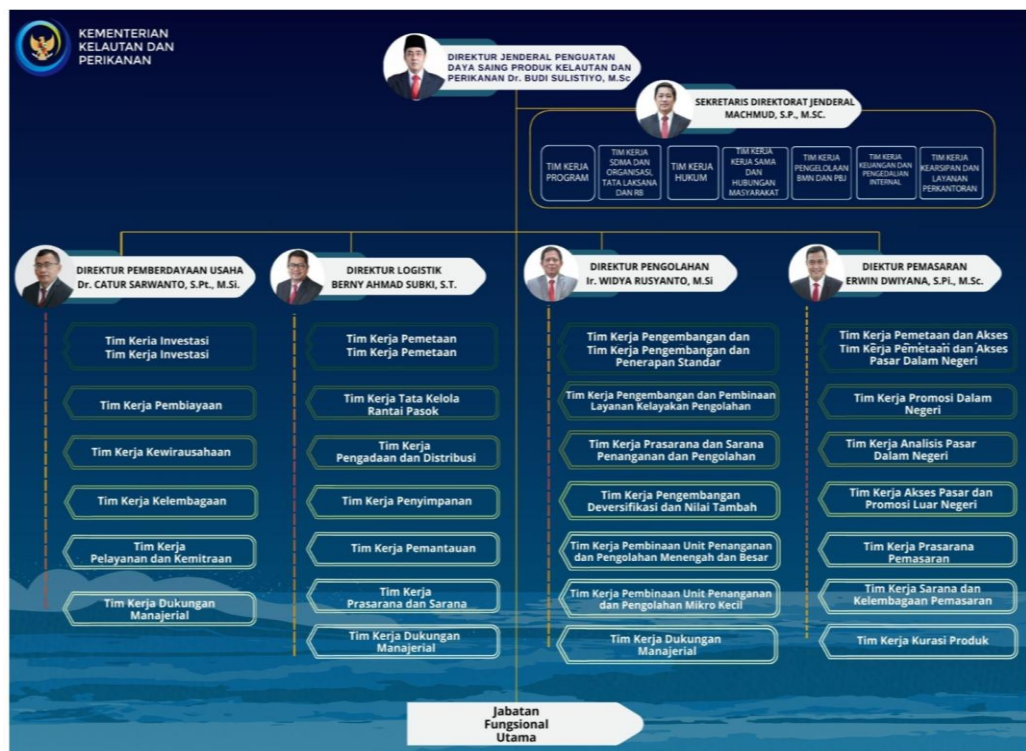
1. Perumusan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan, serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi, peningkatan nilai tambah, dan pengelolaan ketertelusuran produk kelautan dan perikanan, pengelolaan logistik ikan nasional, fasilitasi pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan,

serta pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
2. Direktorat Logistik;
3. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
4. Direktorat Pengolahan;
5. Direktorat Pemasaran;



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

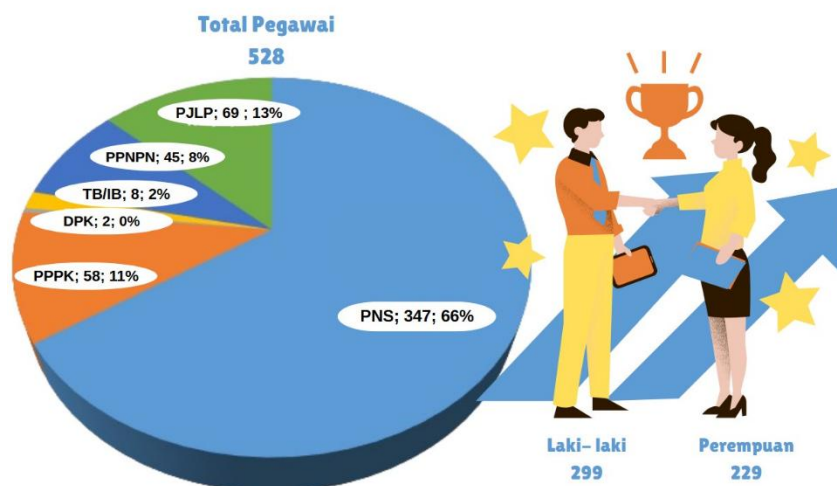
1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganeekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP

4. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2024 mencapai 518 orang yang terdiri dari 297 pegawai Laki-laki dan 229 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:



Keterangan:

Total jumlah pegawai adalah 528 orang, terdiri dari 347 PNS, 58 PPPK, 2 DPK, TV/IB, 45 PPNP dan 69 PJLP. (299 laki-laki dan 229 Perempuan)

Gambar 3. Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2025

5. Permasalahan Utama

A. Permasalahan dan Tantangan Dalam Negeri

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Kedepan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

Produksi ikan yang bersifat musiman juga menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Data statistik perikanan tangkap menunjukkan produksi ikan laut sangat fluktuatif sepanjang tahun dan mengalami musim puncak, musim, sedang, dan musim paceklik penangkapan ikan. Pada musim puncak produksi ikan sangat berlimpah, sementara di musim paceklik hasil

tangkapan susah didapat. Pola musim tersebut juga bisa berbeda di setiap wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Hal ini kemudian menjadi pemicu terjadinya disparitas produksi ikan yang tinggi antar wilayah kepulauan Indonesia.

Disparitas yang menonjol berikutnya dan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional di bidang kelautan dan perikanan adalah disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan. Saat ini, sekitar 82% produksi perikanan tangkap berada di luar Jawa, sedangkan 45% sebaran UPI tersebar di Pulau Jawa. Dampaknya, banyak industri pengolahan ikan kekurangan bahan baku dalam waktu lama yang berakibat pada penghentian aktivitas industri bahkan PHK. Hal itu selalu terjadi setiap tahun, meskipun pada waktu yang sama produksi ikan di Wilayah Indonesia Timur tinggi. Ke depan, hal ini perlu dicari jalan keluar yang tepat, yang tidak merugikan pelaku UPI dan juga nelayan. UPI banyak dikembangkan di Pulau Jawa lebih karena kedekatan dengan pasar potensial yang sebagian besar berada di wilayah Jawa.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi disparitas wilayah produksi ikan dan industri pengolahan adalah dengan penguatan sistem logistik ikan. Sistem logistik ikan dapat membantu UPI mendapatkan bahan baku ikan secara kontinyu, sekaligus mendukung distribusi dan pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang banyak tersebar di Kawasan Indonesia Timur. Namun ternyata sistem logistik ini juga masih menemui banyak kendala terutama terkait konektivitas antar wilayah. Dalam 5 tahun terakhir, kinerja logistik ikan nasional berada di angka 60-70 (skala 1-100). Hal perlu ditingkatkan antara lain melalui penyiapan ekosistem logistik yang baik dan efisien. Koordinasi, kerjasama, dan simbiosisitas aktivitas diantara pelaku logistik perlu ditingkatkan, begitu juga dukungan pemerintah melalui kebijakan taktis yang memicu berkembangnya aktivitas logistik ikan perlu diupayakan. Hal ini akan mendorong tumbuhnya aktivitas logistik

ikan di wilayah produksi, pengumpulan, dan pasar, yang sekaligus memperkuat konektivitas wilayah-wilayah tersebut.

Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 81.350 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.475 unit. Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalan dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerjasama UPI.

Untuk mendukung ekspansi bisnis dan pasar produk kelautan dan perikanan, terutama dalam memperluas jaringan ke pasar ekspor, maka ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar perlu ditingkatkan, serta persyaratan, penyelesaian hambatan dan diplomasi perdagangan perlu diperkuat. Saat ini, informasi produksi seperti musim ikan, jadwal tebar dan panen hanya terjalin antar nelayan, pemilik kapal, pembudidaya, penyedia pakan, dan penyedia perbekalan, sementara informasi pasar hanya terjadi diantara pedagang, pengumpul, dan pelaku ekspor. Ke depan jalur informasi tersebut perlu diperluas dan dikembangkan dari hulu ke hilir, sehingga semua pelaku usaha/bisnis perikanan dapat saling mendukung dan mengatasi permasalahan yang dihadapi bersama. Hal ini penting untuk peningkatan efisien dan pemanfaatan maksimal peluang pasar yang ada. Terkait persyaratan pasar dan hambatan pasar, akan selalu terjadi karena negara importir memiliki regulasi tersendiri atas produk impor dan berupaya melindungi pasar domestik produk mereka. Saat ini ekspor produk kelautan dan perikanan

Indonesia masih bertumpu pada pasar tradisional negara tujuan (AS, Tiongkok, Jepang, dan Uni Eropa), sementara diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, dan UPI terutama yang berskala mikro kecil belum menerapkan prinsip mutu produk ekspor yang baik. Hal ini perlu dipecahkan secara komprehensif, dimana perundingan penyelesaian hambatan ekspor, harus dibarengi dengan upaya peningkatan mutu produk ekspor dan pengembangan intellegent pasar yang membantu diversifikasi pasar produk perikanan dan kelautan. Perwakilan dagang RI di luar negeri (*Indonesia Trade Promotion Center*) dapat membantu dari segi diplomasi

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan perikanan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer *knowledge* berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas Ditjen PDSKP dapat mengakomodasinya, melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk KP, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk KP di pasar potensial dalam dan luar negeri.

B. Permasalahan dan Tantangan Global

Permintaan global terhadap produk-produk *seafood* dipenuhi melalui jaringan perdagangan yang kompleks dan tersebar di berbagai belahan dunia. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kesadaran konsumen terhadap pola makan sehat, permintaan ini terus tumbuh, menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi industri perikanan global. Pada tahun 2023, total nilai impor produk perikanan dunia mencapai USD 184,54 miliar, mengalami penurunan 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, rata-rata pertumbuhan impor perikanan dari 2017 hingga 2023 sebesar 3,16% menunjukkan potensi perkembangan yang berkelanjutan. Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang menjadi importir terbesar.

Tahun 2023 Uni Eropa mendominasi pasar global dengan nilai impor USD 61,85 miliar, meski pertumbuhannya hanya 0,05%. Amerika Serikat berada di posisi kedua dengan USD 27,38 miliar, meski turun 16,23%. Tiongkok dan Jepang juga berkontribusi signifikan dengan nilai impor masing-masing USD 23,32 miliar dan USD 14,37 miliar, keduanya mengalami penurunan masing-masing 0,59% dan 9,21% dari tahun sebelumnya (YoY). Pada tahun 2023, impor perikanan dunia didominasi oleh komoditas trout dan salmon, dengan nilai mencapai USD 35,87 miliar, mencakup 19,4% dari total perdagangan perikanan global, dan tumbuh 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas udang berada di posisi kedua dengan nilai USD 27,00 miliar, menyumbang 14,6%, namun mengalami penurunan sebesar 13,9%. Tuna, tongkol, dan cakalang mencatat nilai impor USD 15,92 miliar (8,6% dari total), dengan penurunan 5,8%. Cumi-cumi, sotong, dan gurita mencatat impor USD 11,44 miliar (6,2% dari total), meskipun turun 2,7%. Tepung dan pakan ikan berkontribusi USD 6,50 miliar (3,5%), dengan penurunan 0,2%. Nilai impor kepiting atau rajungan sebesar USD 5,92 miliar (3,2%), turun 20,6%. Ikan cod mencatat impor USD 5,49 miliar (3,0%), dengan penurunan 9,5%.

Indonesia masih menjadi importir *seafood* untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi lokal. Pada tahun 2023, Indonesia mengimpor produk perikanan sekitar 366.791,62 ton. Impor ini mencakup berbagai jenis *seafood*, termasuk ikan segar, beku, dan olahan mulai dari makarel hingga rumput laut. Nilai impor hasil perikanan Indonesia pun bervariasi dengan makarel menjadi komoditas impor terbesar sebesar USD 136,98 juta. Di sisi lain, ikan Cod dan Rumput Laut mencatat nilai impor yang lebih rendah, masing-masing sekitar USD 36,55 juta dan USD 33,96 juta. Udang dan Cumi-Sotong-Gurita memiliki nilai impor paling kecil, masing-masing USD 38,78 juta dan USD 19,93 juta. Komoditas lain seperti Tepung Ikan juga memiliki nilai impor tinggi hingga USD 64,59 juta.

Saat ini, negara-negara eksportir terbesar di dunia adalah Tiongkok, Norwegia, Ekuador, dan Chili. Tiongkok mendominasi dengan nilai ekspor sebesar USD 20,68 miliar, mencakup 11,18% dari total perdagangan dunia, meskipun turun 11,93% dibandingkan tahun sebelumnya. Norwegia berada di posisi kedua dengan nilai ekspor USD 16,05 miliar (8,68% dari total), dan mencatat pertumbuhan positif sebesar 2,80%. Ekuador dan Chili masing-masing mencatat nilai ekspor USD 9,04 miliar (4,89%) dan USD 8,89 miliar (4,81%), dengan Ekuador mengalami penurunan 10,72%, sementara Chili tumbuh 1,71%. Indonesia berada di peringkat ke-13 dengan nilai ekspor USD 5,6 miliar, berkontribusi 3,03% terhadap total perdagangan perikanan dunia.

Beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia masih menghadapi tantangan di pasar global, dengan pangsa pasar yang relatif kecil dan kalah bersaing dibandingkan negara-negara lain. Salah satu contoh adalah udang, yang menjadi andalan ekspor Indonesia dengan kontribusi sebesar 30,7% dari total ekspor produk perikanan Indonesia pada tahun 2023. Meskipun demikian, Indonesia hanya berada di peringkat kelima sebagai eksportir

udang utama dunia, di bawah Ekuador yang memiliki pangsa pasar 25,6%, India (17,3%), Vietnam (10,3%), dan Tiongkok (6,8%).

Ekspor udang Indonesia juga tengah menghadapi tantangan di pasar Amerika Serikat, yang merupakan importir udang terbesar di dunia. Berdasarkan hasil Preliminary Determination dari United States Department of Commerce (USDOC), Indonesia dinyatakan melakukan tindakan dumping pada periode investigasi 1 September 2022 hingga 31 Agustus 2023. Akibatnya, sejak 1 Juni 2024, ekspor udang beku Indonesia dikenakan tambahan tarif anti-dumping sementara sebesar 6,3%. Besaran tarif anti-dumping final akan ditetapkan setelah penerbitan *Final Determination* secara resmi oleh USDOC. Selain itu, Indonesia juga belum terdaftar sebagai negara yang dapat mengekspor udang hasil tangkapan (*certified nation*) ke Amerika Serikat, yang menyebabkan kendala tambahan bagi ekspor udang Indonesia.

Di sisi lain, Indonesia merupakan produsen utama tuna-cakalang-tongkol dunia, dengan produksi mencapai 1,35 juta ton pada tahun 2022, setara dengan 19,1% dari total produksi dunia menurut FAO 2024. Namun, kontribusi besar ini belum tercermin dalam pangsa pasar tuna-cakalang-tongkol Indonesia di dunia. Pada tahun 2023, Indonesia hanya menempati peringkat kelima eksportir utama tuna-cakalang-tongkol dengan pangsa pasar 6,2% atau setara dengan USD 1,73 miliar, masih di bawah Thailand (14,7%), Spanyol (9,8%), Ekuador (8,7%), dan Tiongkok (7,4%).

Tantangan lainnya datang dari pengenaan tarif tinggi untuk produk olahan (*tariff escalation*) oleh Uni Eropa dan Jepang, yang merupakan importir utama tuna-cakalang-tongkol dunia. KKP terus melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif tersebut. Melalui forum *Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement* yang ditandatangani pada 8 Agustus 2024, disepakati penurunan tarif tuna-cakalang-tongkol kaleng dan olahan lainnya menjadi 0%, yang ditargetkan berlaku efektif pada awal tahun 2025. Negosiasi serupa berlangsung dalam forum *Indonesia-European Union*

Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang bertujuan menurunkan tarif impor produk tuna olahan Indonesia dari 24% menjadi 0%.

Indonesia juga hanya menempati peringkat kelima dan keempat sebagai eksportir global untuk komoditas cumi-sotong-gurita dan rajungan-kepiting. Pada tahun 2023, ekspor cumi-sotong-gurita Indonesia mencapai USD 762,59 juta dengan pangsa pasar 5,9%, berada di bawah Tiongkok (30,6%), Spanyol (10,3%), Maroko (8,4%), dan Peru (6,5%). Sementara itu, ekspor rajungan-kepiting Indonesia mencapai USD 447,65 juta dengan pangsa pasar 7,3%, di bawah Rusia (30,6%), Kanada (18,4%), dan Tiongkok (10,5%).

Namun, Indonesia memiliki posisi yang lebih baik sebagai eksportir rumput laut. Pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai eksportir rumput laut dunia dengan nilai ekspor sebesar USD 433,72 juta dan pangsa pasar 13,8%, hanya kalah dari Tiongkok yang memiliki pangsa pasar 22,0%. Potensi peningkatan ekspor rumput laut Indonesia sangat besar, terutama karena ekspor saat ini didominasi oleh rumput laut kering dengan kontribusi 65,7%, yang sebagian besar diekspor ke Tiongkok. Produksi karaginan Tiongkok sangat bergantung pada bahan baku impor dari Indonesia, khususnya *Kappaphycus alvarezii* (Cottonii) dan *Eucheuma denticulatum* (Spinosum), dengan volume impor sebesar 117.004 ton atau setara dengan 92,8% dari total impor Dried Eucheuma oleh Tiongkok (Zhang, J., et.al, 2023). Posisi komoditas utama Indonesia di pasar global tahun 2023

Tantangan lainnya pada industri perikanan Indonesia adalah masalah keamanan pangan, dimana kontaminasi oleh bakteri patogen seperti Salmonella, Listeria, dan Vibrio dapat menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi konsumen. Kontaminasi ini bisa terjadi sepanjang rantai pasok, mulai dari lingkungan alam, selama proses penangkapan, hingga tahap pengolahan dan distribusi. Di samping itu, munculnya produk substitusi

berbasis sel dan tumbuhan juga menjadi tantangan baru bagi industri perikanan tradisional. Produk-produk ini semakin dilirik karena dianggap lebih berkelanjutan dan etis, mengingat proses produksinya tidak melibatkan penangkapan ikan dan dapat dirancang untuk memiliki profil nutrisi yang lebih baik. Walaupun saat ini produk substitusi tersebut masih dalam tahap pengembangan, potensi pertumbuhannya sangat besar dan bisa menjadi pesaing serius bagi produk perikanan konvensional di masa depan.

Menghadapi tantangan-tantangan ini, sektor kelautan dan perikanan Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan standar kualitas, sekaligus memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam industri perikanan global, sekaligus mendorong keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor ini. Potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam produksi rumput laut, tuna, dan komoditas perikanan lainnya harus dioptimalkan untuk memenuhi permintaan pasar global yang terus berkembang, sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya laut yang ada.

6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.



Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. Rancangan Rencana Strategis

A. Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Visi Indonesia Emas 2045 didasari oleh landasan pemikiran tentang visi abadi Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi Presiden dan Wakil Presiden ini juga didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rancangan rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai organisasi yang berada di bawah Presiden dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya

Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Untuk mendukung agenda pembangunan/penguatan transformasi, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung 2 arah kebijakan KKP yaitu sebagai berikut :

a. Arah Kebijakan :

- 1) Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan
- 2) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan

b. Strategi

- 1) Hilirisasi penangkapan ikan berbasis komoditas unggulan
- 2) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha
- 3) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional
- 4) Pengembangan industri pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah
- 5) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan
- 6) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat
- 7) Penguatan pasar luar negeri

Selanjutnya upaya transformasi super prioritas (*Game Changers*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 adalah:

- Industrialisasi yang berorientasi pada hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor
- Ketahanan energi dan air, serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*Food, Energy, Water*)

B. Misi

Dalam rangka mencapai visi dan dua agenda pembangunan/penguatan transformasi yang didukung, maka Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) perlu menentukan misi yang akan dilakukan untuk tahun 2025-2029. Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden serta Misi KKP.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. “Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 8, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
- b. “Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 2, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan Misi

- Asta Cita 6, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- c. “Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 3, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan Misi Asta Cita 5, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 - d. “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan” yang menjabarkan Misi Asta Cita 4, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan
 - e. “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas” yang menjabarkan Misi Asta Cita 7, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Dari lima misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

- a. Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
- b. Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

C. Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025-2029. Mengacu rancangan Renstra KKP tahun 2025-2029, ada lima tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- b. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- c. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- e. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

Dari lima tujuan tersebut yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah “meningkatkan mutu dan daya saing hasil produk kelautan dan perikanan”. Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai melalui program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama tahun 2025-2029.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2024, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

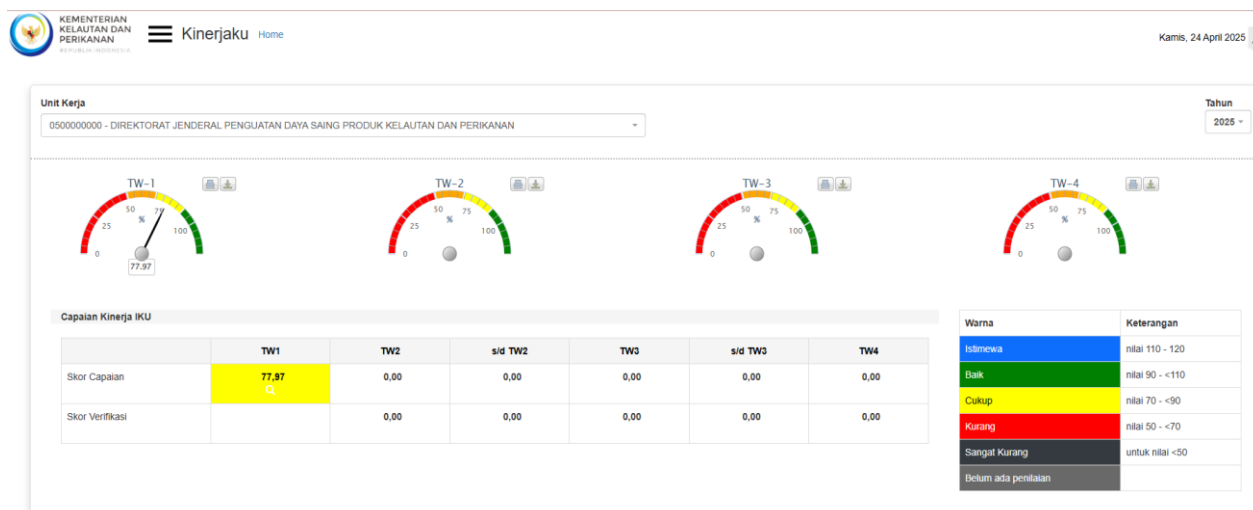
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1.	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar)	0,57
		2.	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,70
		3.	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51
		4.	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP	5.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja triwulan I tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan Maret 2025. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 77,97. Capaian NKO pada triwulan I tahun 2025 sebagaimana terdapat pada Gambar 5.



Gambar 5. Dashboar Nilai Kinerja Organisasi PDSPKP

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW I 2025	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2025	TW I 2025		Tahun 2025	TW I 2025
1	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD miliar)	0,57	0,14	0,07	12,28	50

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW I 2025	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2025	TW I 2025		Tahun 2025	TW I 2025
2	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,68	1,35	1,43	25,18	105,93
3	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51	-	-	-	-
4	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5	-	-	-	-
5	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	-	-	-	-

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Program 1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing

A. Nilai Ekspor Rumput Laut

Ekspor rumput laut adalah kegiatan mengeluarkan komoditas rumput laut dari wilayah pabean (*the custom frontier*) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (baran hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas rumput laut yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Nilai ekspor rumput laut adalah nilai komoditas rumput laut yang dikeluarkan dari wilayah pabean

(the custom frontier) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (baran hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas rumput laut yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut yang dihitung dalam satuan US Dollar (USD).

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar)	0,14	-	-	0,57	0,07	-	-	0,07	50	12,28	-	-

Sumber Data: BPS, Diolah Ditjen PDSPKP

Nilai ekspor rumput laut Triwulan I tahun 2025 mencapai USD 0,07 miliar. Capaian tersebut setara dengan 50% terhadap target triwulan I tahun 2025 sebesar USD 0,14 miliar, dan 12,28% terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar USD 0,57 miliar. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaian periode triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Nilai ekspor rumput laut berdasarkan negara tujuan ekspor dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 4. Nilai Ekspor Rumput Laut Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor

Negara	2024	2025
Tiongkok	57.178.019	48.669.041
Uni Eropa	8.552.455	7.097.337
Lainnya	3.371.403	3.571.266
Amerika Serikat	2.535.659	3.336.316
Asean	4.478.248	3.098.173
Korea Selatan	1.710.041	1.836.598
Jepang	2.914.221	1.692.129
Inggris	2.232.615	1.457.776
Rusia	1.132.690	1.305.965

Negara	2024	2025
Australia Dan Selandia Baru	1.215.163	903.126
Taiwan	84.663	204.476
Timur Tengah	2.076	136.880
Kanada	2.158.686	108.541
Brazil	213.550	50.016
Hongkong	77.317	43.138
Total Ekspor	87.856.806	73.510.778

Ket. Pencapaian Nilai Ekspor Rumput Laut Sampai Dengan Maret 2025

Berdasarkan tabel di atas, negara utama dengan nilai ekspor rumput laut terbesar adalah sebagai berikut:

- Tiongkok sebesar USD 48,67 Juta (66,2%);
- Uni Eropa sebesar USD 7,10 Juta (9,7%);
- Amerika Serikat sebesar USD 3,34 Juta (4,5%);
- ASEAN sebesar USD 3,10 Juta (4,2%);
- Korea Selatan sebesar 1,84 Juta (2,5%).

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Pelaksanaan Kerjasama Pemasaran Rumput Laut. Dalam upaya perumusan kerjasama pemasaran rumput laut, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pelaku melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada tanggal 25 Januari 2025 antara:
 - Koperasi Produsen Mina Agar Makmur dengan PT. Agarindo Bogatama dengan nomor 01/PKS/KMAM-ABT.1/2025 dan 01/PKS/ABT-KMAM.1/2025 tentang Pemasaran Rumput Laut *Gracilaria* spp.
 - Koperasi Produsen Mina Agar Makmur dengan Kelompok Pembudidaya Tunas Makmur dengan nomor 02/PKS/KMAM-ABT.I/2025 dan 01/PKS/KTMKMAM.I/2025 tentang Pemasaran Rumput Laut



Gambar 6. Fasilitas Kerjasama Pemasaran Rumput Laut

- b. Penumbuhan Eksportir Produk Rumput Laut. Pemerintah menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan ekspor dan investasi dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor dan investasi harus dijaga agar terus meningkat karena basis pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berdasarkan konsumsi, baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta. Pembahasan Penyusunan *Roadmap dan Integrated Action Plan on National Seaweed Development* dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2025. Rapat dipimpin oleh: Direktur Pemasaran dan dihadiri perwakilan Biro Perencanaan, Setditjen Perikanan Budidaya, Setditjen PDSPKP, Dit. Rumput Laut, Dit. Pengolahan, Bappenas, Kemenkopangan, Astruli, UNIDO, JASUDA, Prof. La Ode M. Aslan (Universitas Haluoleo), dan Prof. Dr. Ir. Joko Santoso (IPB University). Rapat bertujuan untuk mendapatkan *outline* masukan terkait dengan penyusunan *roadmap* dan *integrated action plan on national seaweed development* dari KKP-TSIN untuk disampaikan kepada Bappenas, serta rencana pelaksanaan FGD.

Penyebab ketidaktercapaian target ekspor rumput laut adalah dikarenakan turunnya harga rumput laut di pasar global baik pada rumput laut kering dan rumput laut olahan. Beberapa persepsi publik terkait kandungan rumput laut yang bisa meningkatkan inflamasi, bisa jadi mempengaruhi daya jual produk olahan rumput laut, selain itu

pertumbuhan ragam produk *hydrocolloid* juga mempengaruhi daya saing produk karaginan dengan produk lainnya

Atas permasalahan tersebut akan dilakukan upaya perbaikan dengan upaya promosi/kampanye terkait amannya produk olahan berbasis rumput laut terutama yang ditujukan untuk produk konsumsi.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Rumput Laut sebesar Rp1.250.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp 18.660.000,- atau setara dengan 1,49%.

B. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Komoditas produk perikanan lainnya adalah komoditas hasil perikanan yang ditangani, diolah, dan atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku, dan olahan diluar komoditas rumput laut. Ekspor produk perikanan lainnya adalah kegiatan mengeluarkan komoditas produk perikanan lainnya dari wilayah pabean (*the custom forntier*) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas produk perikanan lainnya yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut. Nilai ekspor produk perikanan lainnya adalah nilai komoditas produk perikanan lainnya yang dikeluarkan dari wilayah pabean (*the custom forntier*) Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial (barang hibah, sumbangan, hadiah), serta komoditas produk perikanan lainnya yang akan diolah di luar negeri dan hasilnya dimasukkan kembali ke negara tersebut yang dihitung dalam satuan US Dollar (USD).

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	1,35	-	-	5,68	1,43	-	-	-	105,93	25,18	-	-

Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP

Nilai ekspor produk perikanan lainnya Triwulan I tahun 2025 mencapai USD 1,43 miliar. Capaian tersebut setara dengan 105,93 % terhadap target triwulan I tahun 2025 yaitu sebesar USD 1,35 miliar, dan 25,18% terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar USD 5,68 miliar. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaian periode triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Nilai ekspor produk perikanan lainnya berdasarkan negara tujuan ekspor dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 6. Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor

Negara	2024	2025
Amerika Serikat	459.633.175	495.949.990
Asean	187.662.794	235.742.845
Tiongkok	262.141.539	209.424.149
Jepang	149.232.374	147.877.997
Uni Eropa	93.600.924	100.426.644
Lainnya	42.011.395	56.181.746
Timur Tengah	35.565.990	38.662.720
Hongkong	23.639.463	30.251.662
Taiwan	33.134.969	28.798.465
Australia Dan Selandia Baru	28.806.144	25.935.541
Kanada	15.430.939	25.095.474
Korea Selatan	18.171.073	17.915.851
Inggris	12.354.330	9.607.655
Rusia	5.451.995	4.624.152

Negara	2024	2025
(Blank)		312.323
Efta	505.876	307.761
Brazil	183.824	253.604
Total Ekspor Perikanan	1.367.526.805	1.427.368.580

Berdasarkan negara utama tujuan ekspor produk perikanan lainnya yaitu Amerika Serikat sebesar USD 495,95 juta (34,75%), ASEAN sebesar USD 235,74 juta (16,52%), Tiongkok sebesar USD 209,42 juta (14,67%), Jepang sebesar USD 147,88 juta (10,36%), dan Uni Eropa sebesar USD 100,43 juta (7,04%).

Nilai ekspor berdasarkan pasar negara utama ekspor dan komoditas perikanan Indonesia periode triwulan I tahun yaitu sebagai berikut:

- a. Komoditas Udang (USD 471,38 Juta)
 - 1) Amerika Serikat USD 299,85 juta (63,6%)
 - 2) Jepang USD 76,18 juta (16,2%)
 - 3) Tiongkok USD 24,04 juta (5,1%)
 - 4) Uni Eropa USD 19,79 juta (4,2%)
 - 5) ASEAN USD 12,13 juta (2,6%)
- b. Komoditas Tuna-Cakalang (USD 2545,07 juta)
 - 1) ASEAN USD 61,77 juta (24,3%)
 - 2) Amerika Serikat USD 48,33 juta (19,0%)
 - 3) Jepang USD 45,97 juta (18,1%)
 - 4) Uni Eropa USD 32,98 juta (13,0%)
 - 5) Timur Tengah USD 30,03 juta (11,8%)
- c. Komoditas Cumi-Sotong-Gurita USD 194,20 juta
 - 1) ASEAN USD 74,50 juta (38,4%)
 - 2) Tiongkok USD 68,41 juta (35,2%)
 - 3) Uni Eropa USD 18,51 juta (9,5%)
 - 4) Taiwan USD 8,39 juta (4,3%)
 - 5) Amerika Serikat USD 8,21 juta (4,2%)
- d. Komoditas Rajungan-Kepiting USD 131,98 juta

- 1) Amerika Serikat USD 80,23 juta (60,8%)
- 2) Tiongkok USD 29,02 juta (22%)
- 3) ASEAN USD 9,73 juta (7,4%)
- 4) Jepang USD 3,25 juta (2,5%)
- 5) Uni Eropa USD 2,86 juta (2,2%)

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Penyelesaian Hambatan Ekspor dan Perluasan Akses Pasar Luar Negeri melalui Kertas Posisi Runding. Dalam rangka penguatan ekspor produk perikanan Indonesia Ditjen PDSPKP telah melaksanakan rapat secara *hybrid* pada 12 Maret 2025 yang dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, Dr. Suhana, Dr. Adipati Rahmat Gumelar, perwakilan Unit Kerja Lingkup Ditjen PDSPKP, dan Pusat Manajemen Mutu. Rapat bertujuan membahas strategi penguatan ekspor, dengan komoditas utama udang, tuna-cakalang, rajungan-kepiting, rumput laut, lobster, dan tilapia.
- b. Perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Hasil KP. Persentase rancangan SNI produk perikanan yang memenuhi tahapan perumusan SNI adalah capaian perumusan SNI dibandingkan dengan keseluruhan tahapan perumusan SNI pada tahun berjalan. Tahapan perumusan Rancangan SNI produk perikanan meliputi RSNI1, RSNI2, RSNI3, penyampaian RSNI ke BSN. Perumusan rancangan SNI dilakukan oleh Komite teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (*e-balloting*) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di *website* SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I, yaitu:

- 1) Rapat Identifikasi Kebutuhan SNI dilaksanakan tanggal 14 Januari 2025 di RR Sekretariat GMB III Lt. 14. Rapat dibuka oleh Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar, serta dihadiri oleh Perwakilan dari BSN, Perwakilan unit kerja Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP, dan Timja Lingkup Dit. Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan SNI 2025 - 2029.



Gambar 7. Rapat Identifikasi Kebutuhan SNI

- 2) Rapat Tindak Lanjut Kaji Ulang SNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025 di RR Pembinaan Mutu GMB III Lt. 12A. Rapat dibuka oleh Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar, serta dihadiri oleh Perwakilan dari BSN, dan pelaksana Timja Pengembangan dan Penerapan Standar, Dit. Pengolahan. Tujuan rapat yaitu untuk mengidentifikasi hasil kaji ulang yang belum di tindak lanjut.



Gambar 8. Rapat Tindak Lanjut Kaji Ulang SNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan NonPangan

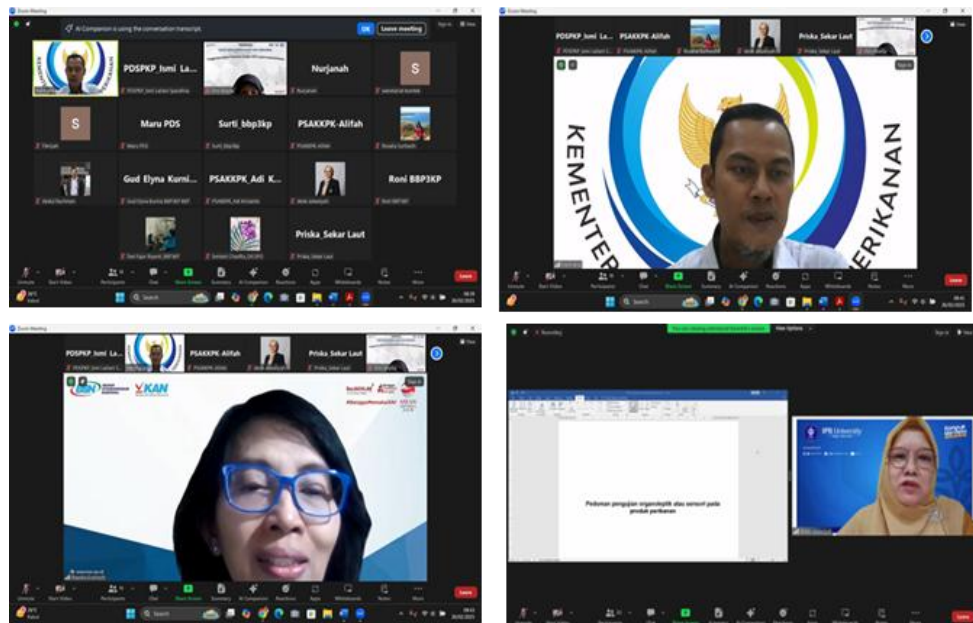
- 3) *Refreshment* Konseptor dan Editor RSNI 2025 dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 melalui *zoom meeting*. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh Perwakilan Komtek, Konseptor, dan Editor SNI 65-05 Produk Perikanan dan Pelaksana pada Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar, Direktorat Pengolahan. Tujuan dilaksanakan *Refreshment* bagi konseptor dan editor ini adalah untuk memberikan pemahaman dan peningkatan bagi konseptor/editor dalam mempersiapkan draft RSNI.



Gambar 9. Refreshment Konseptor dan Editor RSNI 2025

- 4) Rapat Koordinasi Pelaksanaan Surveilan SNI Wajib dilaksanakan tanggal 21 Februari 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Akreditasi, BSN, Tim Kerja Hukum, Tim Kerja Program, Tim Kerja Data dan Pelayanan Publik, dan Tim Kerja Lingkup Dit Pengolahan. Tujuan rapat yaitu menindaklanjuti surat Kepala BBP3KP nomor B.216/BBP3KP/PDS.520/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Surveilan Sertifikasi SNI Wajib yang berpotensi tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi anggaran.

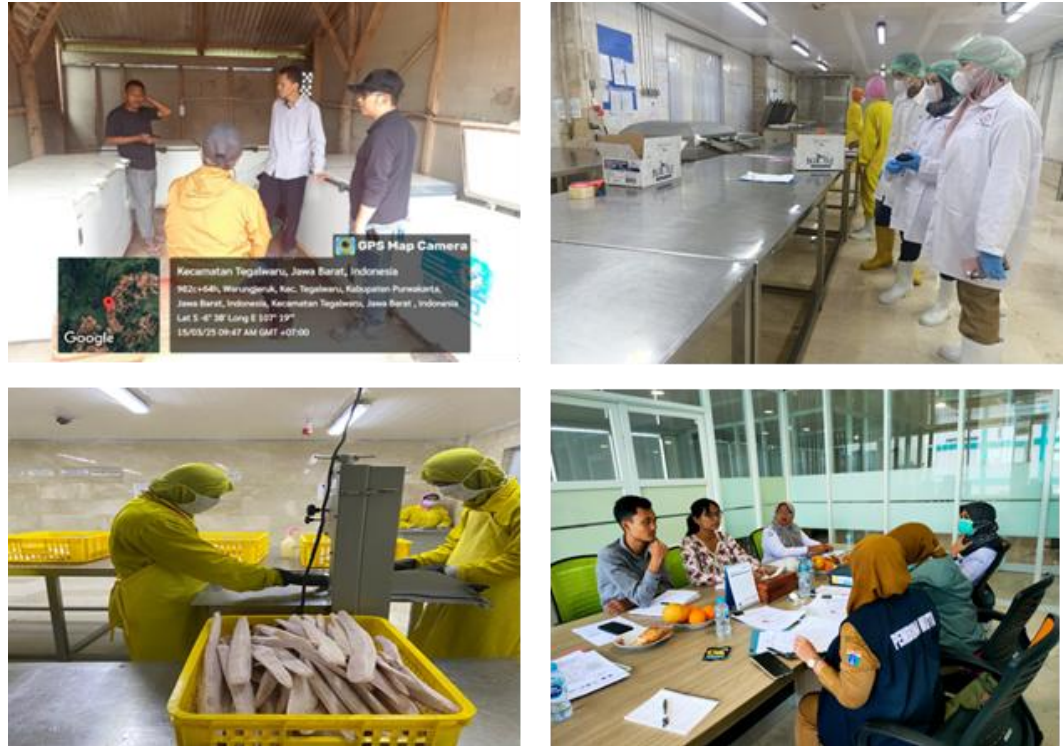
- 5) Rapat RSNI1 Komtek 65-05 Produk Perikanan dilaksanakan tanggal 26 – 27 Februari 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-05, Konseptor, sekretariat komtek 65-05 sekaligus editor RSNI produk perikanan serta perwakilan dari Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Penilaian Kesesuaian – BSN. Tujuan rapat yaitu membahas konsep yang telah disusun oleh konseptor berupa RSNI0 berdasarkan data dukung dan literatur.



Gambar 10. Rapat RSNI1 Komtek 65-05 Produk Perikanan

- c. Pembinaan Industri Pengolahan Produk KP. Pembinaan Unit Pengolahan Produk KP menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP dilakukan melalui sosialisasi, bimtek, dan atau pembinaan lapangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dan/atau manual HACCP dan/atau laporan pembinaan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I, yaitu:
- 1) Pembinaan Unit Pengolahan Ikan dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 – 15 Maret 2025, bertempat di Jakarta, Purwakarta, dan Tangerang Selatan. Kegiatan dilaksanakan secara kolaboratif bersama dengan pembina mutu Dinas Kelautan dan Perikanan

wilayah setempat dan pelaku usaha kelautan dan perikanan dari UPI yang dituju. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan verifikasi lapangan dan pembinaan penerapan mutu program kelayakan dasar *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan SSOP bagi UPI dalam rangka penerbitan rekomendasi SKP.



Gambar 11. Kegiatan Pembinaan Unit Pengolahan Ikan

- 2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SPP Seram Bagian Barat dan SPP Kota Banda Aceh dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2025, bertempat di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rapat dilaksanakan secara daring, dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seram Bagian Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, Pengelola Satker BPP3KP Ambon, Pimpinan Koperasi Konsumen Syariah Sabena Jaya PPS Kutaraja, Pimpinan Poklahsar Samudera Tuna dan Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan serta perwakilan dari tim kerja Direktorat

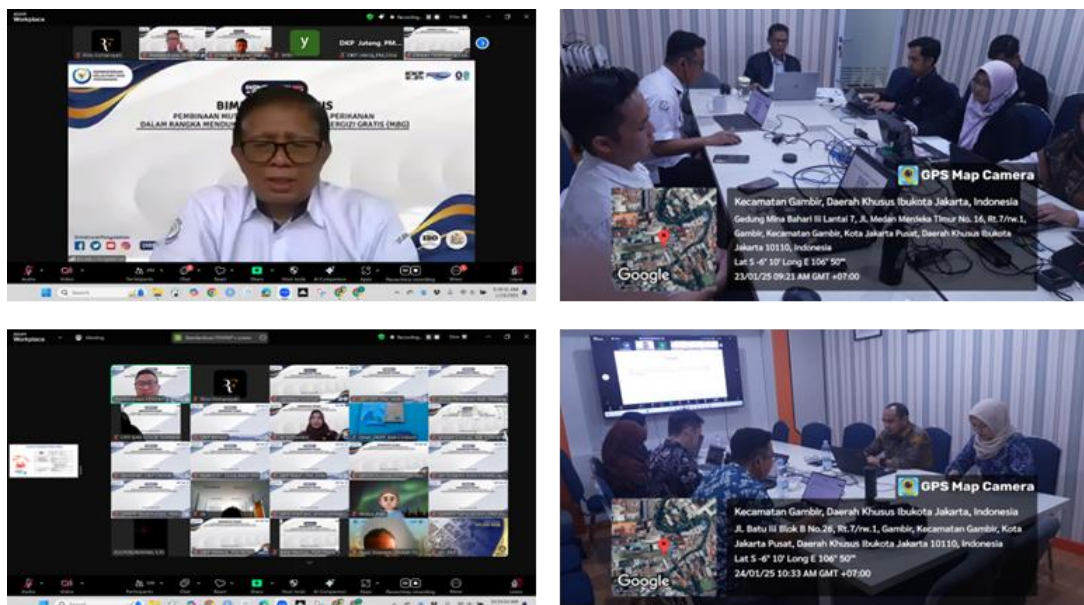
Pengolahan. Tujuan pelaksanaan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitasi Sarana Pasca Panen (SPP) agar dilakukan pemanfaatan sesuai tujuan.



Gambar 12. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pemanfaatan SPP Seram Bagian Barat dan SPP Kota Banda Aceh

- 3) Koordinasi pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2025, bertempat di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid, dipimpin oleh Katimja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua dan perwakilan Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan koordinasi pembinaan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) sehubungan dengan perubahan organisasi yang baru dimana proses penerbitan sertifikasi dilaksanakan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dan untuk Direktorat Pengolahan fokus melakukan pembinaan.
- 4) Bimbingan Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mendukung Kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2025 untuk wilayah Barat (Pulau Sumatera dan Pulau Jawa), dan tanggal 30-31 Januari 2025

untuk wilayah wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, Maluku, Maluku Utara dan wilayah Papua. Rapat dilaksanakan secara hibrid, dibuka oleh Direktur Pengolahan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dihadiri Pembina Mutu lingkup wilayah tersebut di atas. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mempersiapkan personil pembina mutu Pusat dan daerah untuk untuk akselerasi pembinaan mutu hasil kelautan dan perikanan sekaligus mendukung program Pemerintah untuk Makanan Bergizi Gratis (MBG).

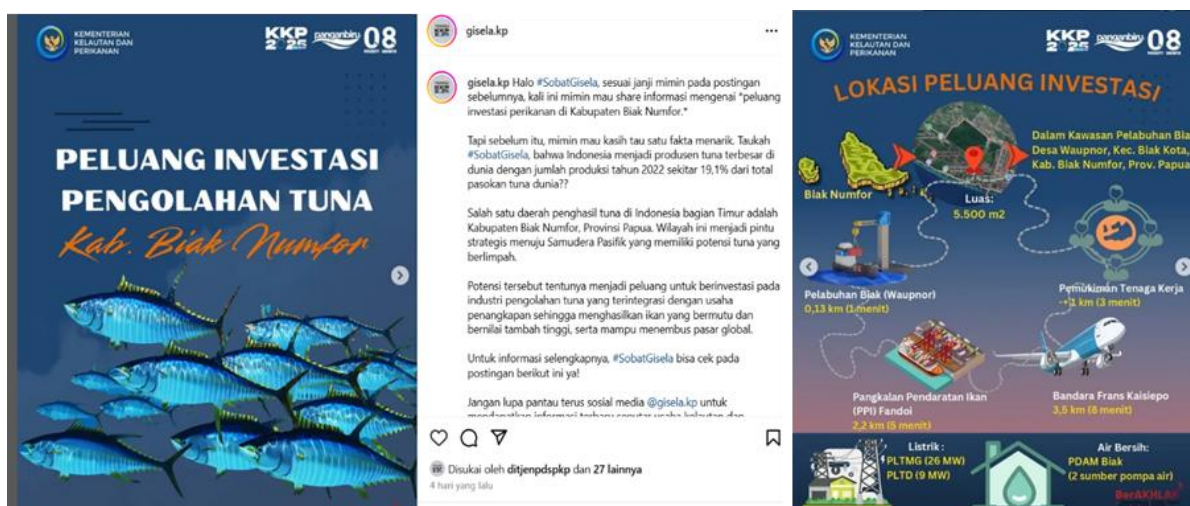


Gambar 13. Bimbingan Teknis Teknis Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

d. Pelaksanaan Promosi Usaha dan Investasi KP

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode triwulan I antara lain Promosi peluang investasi pengolahan tuna di Kabupaten Biak Numfor melalui media sosial. Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu daerah penghasil tuna di Indonesia bagian Timur, Provinsi Papua. Wilayah ini menjadi pintu strategis menuju Samudera Pasifik yang memiliki potensi tuna yang

berlimpah. Potensi tersebut tentunya menjadi peluang untuk berinvestasi pada industri pengolahan tuna yang terintegrasi dengan usaha penangkapan sehingga menghasilkan ikan yang bermutu dan bernilai tambah tinggi, serta mampu menembus pasar global.



Gambar 14. Promosi Peluang Investasi Pengolahan Tuna Kabupaten Biak Numfor

e. Pembangunan Kawasan Hilirisasi KP

Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan merupakan kawasan pemusatan dan pengelolaan perusahaan kelautan dan perikanan yang terintegrasi secara sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran dalam rangka Hilirisasi hasil kelautan dan perikanan. Pada triwulan I Ditjen PDSPKP melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha telah menyusun rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Rancangan peraturan tersebut telah dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Menindaklanjuti harmonisasi dimaksud, Ditjen PDSPKP telah melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi (BKPM) pada tanggal 21 Januari 2025 di Ruang Rapat Pemberdayaan Usaha. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Hilirisasi Kelautan dan Perikanan – BKPM, Sekretaris Ditjen PDSPKP, Direktur Logistik, Direktur Pengolahan, dan

pegawai lingkup Ditjen PDSPKP. Agenda pada rapat dimaksud yaitu pembahasan konsep dan rencana program hilirisasi kelautan dan perikanan serta sinergitas kegiatan hilirisasi.



Gambar 15. Koordinasi dan Sinergitas Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan dengan BKPM

- f. Pembinaan Pelaku Usaha dalam rangka Penguatan Sistem Logistik dilaksanakan melalui Sosialisasi Pembinaan Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan Penerbitan Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI) pada tanggal 13 Maret 2025, dan dilatarbelakangi oleh Studi FAO mencatat bahwa *looses* pada produk perikanan cukup tinggi, tercatat di Asia tenggara sebesar 15% (kegiatan distribusi) dan 9% (kegiatan pengolahan). Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sistem Distribusi Ikan ini maka perlu dilakukan Sosialisasi Cara Distribusi Ikan yang Baik agar para pelaku usaha dapat menerapkan Cara Distribusi Ikan yang Baik dan selanjutnya dapat dilakukan proses Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan. Dilaksanakannya pembinaan ini bertujuan agar pemangku kepentingan dan pelaku usaha distribusi ikan dapat memperoleh informasi dan pemahaman tentang penerapan Cara Distribusi Ikan yang Baik serta Sertifikasi, Penerapan Distribusi Ikan, sehingga pelaku usaha dapat segera mengajukan pembinaan dan/atau sertifikasi pada saat peraturan ini berlaku secara efektif. Pelaku usaha pengadaan ikan (*supplier*) dapat menerapkan CDIB secara optimal untuk menjaga mutu dan kesegaran ikan hingga sampai ke konsumen serta

memastikan ikan yang didistribusikan bebas dari kontaminasi dan layak konsumsi. Penerapan CDIB oleh supplier juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan ekspor produk perikanan dalam memenuhi standar Internasional.

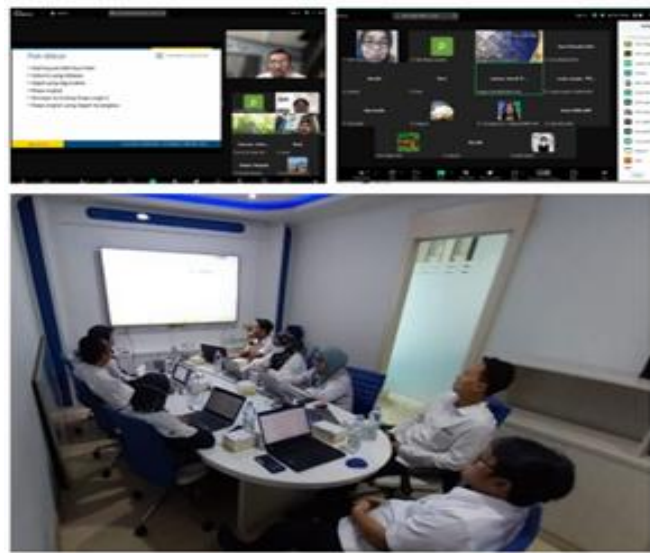
- g. Implementasi Sistem Telusur Logistik Ikan Nasional (STELINA) oleh Pelaku Usaha melalui kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) pada tanggal 21 Maret 2025. Latar belakang kegiatan Sosialisasi implementasi STELINA dilaksanakan untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan produk perikanan Indonesia. Sistem ini mencakup seluruh rantai pasok perikanan dari hulu ke hilir, mendukung regulasi baru yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.32 Tahun 2024. Regulasi ini diberlakukan sebagai kewajiban untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha tentang pelaporan ketertelusuran dalam STELINA dan adanya sanksi administratif. Tujuan kegiatan Sosialisasi implementasi STELINA: Memberikan pemahaman kepada pelaku usaha terkait implementasi STELINA versi terbaru. Memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha dalam penerapan sistem keterelusuran. Mengatasi kendala dan tantangan teknis dalam penginputan data STELINA Pemenuhan persyaratan pasar global untuk produk perikanan yang tertelusur dan berkelanjutan di sepanjang rantai pasok. Dukungan Pengawasan oleh Ditjen PSDKP dalam penerapan STELINA. Peserta dalam kegiatan ini Pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah, distributor, eksportir, dan importir), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan lingkup KKP dengan jumlah peserta 917 orang.



Gambar 16. Kegiatan Sosialisasi Implementasi STELINA

- h. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Rantai Pasok melalui kegiatan koordinasi penyiapan penguatan logistik ikan nasional melalui mekanisme *Public Service Obligation* (PSO) pada tanggal 6 Februari 2025 dipimpin oleh Direktur Logistik, dihadiri oleh perwakilan tenaga ahli Tim Pustrat UGM dan Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, Dit. Logistik. Kegiatan ini berfokus pada studi PSO dan pembaharuan logistik, perhitungan angka berdasarkan sampel satu pengusaha, pengayaan data dan biaya transportasi serta membahas perlunya eksplorasi lebih lanjut dan memperdalam strategi bisnis pelaku usaha. Koordinasi penyiapan penguatan logistik ikan nasional melalui mekanisme operator SLIN dan *Public Service Obligation* (PSO) pada tanggal 24 Februari 2025 di Gedung Mina Bahari III KKP, koordinasi penyiapan penguatan logistik ikan nasional melalui mekanisme operator SLIN dan *Public Service Obligation* (PSO) yang dipimpin oleh Direktur Logistik dan Katimja Tata Kelola Rantai Pasok, dan dihadiri oleh perwakilan tenaga ahli Tim Pustrat UGM, dan Tim kerja hukum Setditjen PDSPKP. *Resume* dari kegiatan ini adalah Perhitungan subsidi pengangkutan ikan dari wilayah penangkapan ke wilayah pemasaran paling layak untuk diterapkan,

dengan nilai manfaat yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Penerapan subsidi tersebut memerlukan penyiapan mitigasi, karena adanya beberapa risiko yang perlu dihadapi, terutama pada aspek perdagangan internasional, aspek operasional, dan sosial (ketepatan sasaran, kemudahan menjalankan, dan konflik antar pelaku).



Gambar 17. koordinasi penyiapan penguatan logistik ikan nasional

Penyebab tercapainya target ekspor produk perikanan adalah adanya peningkatan permintaan akan produk perikanan Indonesia di pasar internasional terutama untuk produk udang dan TCT. Selain itu bertambahnya jumlah *buyer* juga memperluas distribusi global produk perikanan Indonesia di pasar internasional.

Untuk terus meningkatkan capaian nilai ekspor tersebut, akan terus dilakukan upaya-upaya promosi/kampanye produk perikanan Indonesia melalui diseminasi profil/booklet informasi dan partisipasi aktif dari KKP dan pelaku usaha dalam mengikuti pameran/expo baik di dalam maupun di luar negeri.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya

sebesar Rp11.902.950.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp210.408.000,- atau setara dengan 1,77%.

C. Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri merupakan total nilai yang dihasilkan dari serapan produk perikanan dalam rumah tangga nasional. Penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri menggunakan basis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik yang diperoleh 1 (satu) tahun setelah tahun berjalan, sehingga capaian yang dihasilkan merupakan angka prognosa.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2023	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	-	-	-	310,51	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp310,51 triliun. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Perluasan Safari Gemarikan adalah Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan bagi kesehatan, meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, mendukung program prioritas nasional percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, mempromosikan produk perikanan sebagai makanan kaya gizi dan protein serta menyerap produksi ikan/olahan ikan pada UMKM setempat serta pemenuhan gizi masyarakat. Pada kegiatan ini juga dilakukan distribusi Paket Gemarikan dengan tujuan untuk mengenalkan ragam produk olahan ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam tingkatan semua usia dan mengenalkan produk UMKM dan menjadi sumber pendapatan untuk UMKM setempat. Telah dilaksanakannya kegiatan promosi kampanye Gemarikan di beberapa daerah pada Triwulan I Tahun 2025, meliputi Kota Medan, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Bogor.



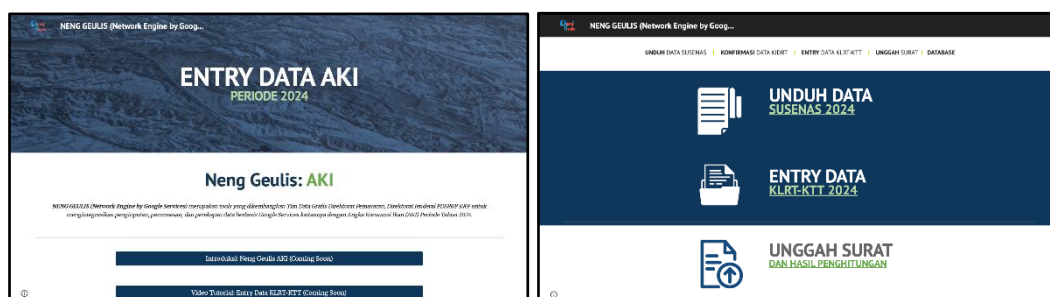
Gambar 18. Pelaksanaan Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)

- b. Penyediaan Peralatan Pemasaran. Peralatan pemasaran merupakan Bantuan Pemerintah langsung kepada masyarakat dalam hal ini koperasi/kelompok perikanan berupa *cool box* guna mendukung

distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Adapun Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan I yaitu telah dilaksanakan pembahasan Juknis Bantuan Peralatan Pemasaran pada tanggal 18 Februari 2025 untuk mempercepat koordinasi proposal yang akan di serahkan dari anggota DPR ke Direktorat Pemasaran

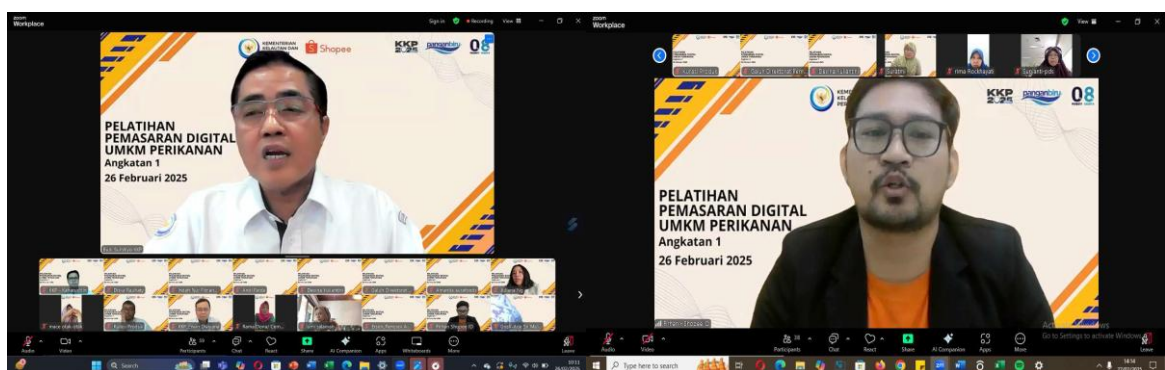
c. Penyusunan Profil Pasar Dalam Negeri Hasil Kelautan Perikanan. Penyusunan profil pasar dalam negeri hasil kelautan perikanan dalam rangka mendukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdiri dari kegiatan penghitungan angka konsumsi ikan, penghitungan nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri, serta penghitungan data dan informasi lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I tahun 2025, yaitu:

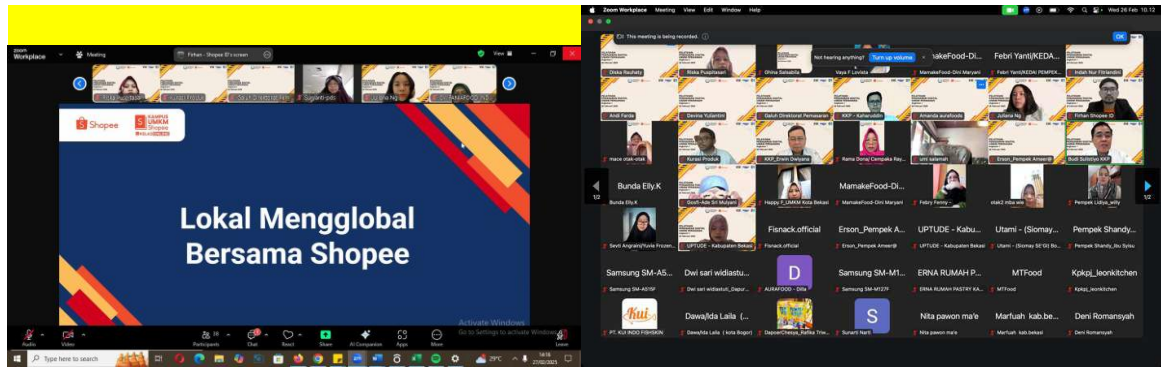
- 1) Pengolahan *raw data* Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik Tahun 2024 untuk memperoleh data angka konsumsi ikan (AKI) tertimbang tahun 2024. Capaian AKI Tertimbang Nasional sebesar 25,31 kg/kapita/tahun setara utuh segar atau meningkat 0,96% dari tahun 2023 (capaian AKI Tertimbang 2023 sebesar 25,07 kg/kapita/tahun setara utuh segar)
- 2) Pengembangan *tools* pengolahan data AKI eksisting tahun 2024 yaitu Neng Geulis. *Tools* ini bertujuan untuk pengolahan data di pusat dan daerah dalam menghitung data AKI, serapan ikan, dan preferensi konsumen berdasarkan wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta berdasarkan jenis ikan secara lebih efisien.



Gambar 19. Dashboard Tools Pengolahan Data AKI

- 3) Pelaksanaan *Pre-Workshop* Penghitungan AKI pada tanggal 21 Maret 2025 secara daring. Kegiatan dihadiri oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan. Pada kegiatan tersebut disampaikan bahwa pada tahun 2025 akan dilakukan finalisasi data AKI Eksisting tahun 2024, penghitungan AKI Tertimbang tahun 2025, serta penyampaian basis data AKI Tertimbang tahun 2019-2024.
- 4) Penyusunan profil pasar komoditas perikanan budidaya berdasarkan preferensi konsumen sebagaimana tercantum pada Nota Dinas nomor 158/DJPDSPKP/TU.210/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Preferensi Konsumsi Ikan Budi Daya tahun 2024.
- d. Kurasi Produk Kelautan Perikanan. Kegiatan lain dalam rangka peningkatan akses pemasaran digital, Direktorat Pemasaran bekerjasama dengan PT Shopee Internasional Indonesia telah melaksanakan pelatihan pemasaran digital melalui *platform* Shopee. Pelatihan Pemasaran Digital UMKM Perikanan dilaksanakan secara *online* pada tanggal 26-27 Februari 2025, dibuka oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, dihadiri oleh Direktur Pemasaran, Trainer dari Kampus UMKM Shopee, UMKM perikanan, wakil dari Direktorat Pemberdayaan Usaha, Setditjen PDSPKP, dan Tim Kerja Kurasi Produk.

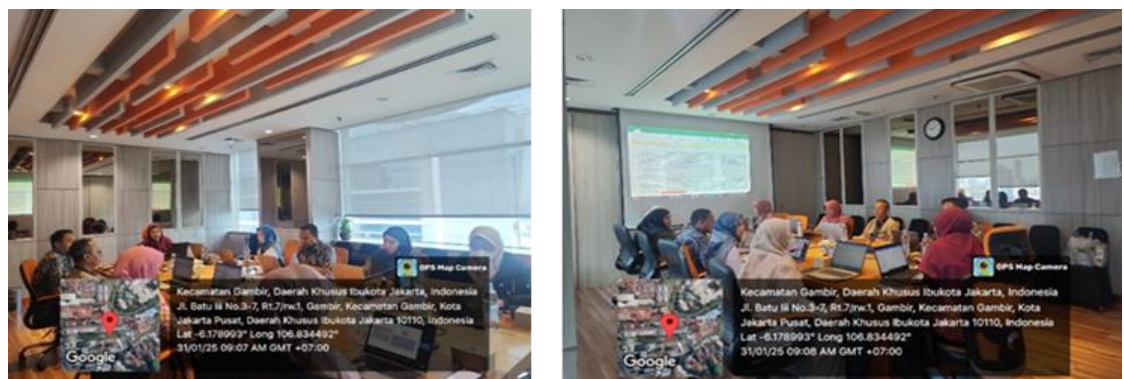




Gambar 20. Pelatihan pemasaran digital melalui platform Shopee

e. Penyusunan Profil Industri Pengolahan Hasil Perikanan. Produksi Olahan KP adalah volume produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan skala mikro, kecil (MK) dan skala menengah besar (MB). Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I, yaitu:

- 1) Pertemuan Pembahasan Populasi UPI Menengah Besar Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka persiapan pendataan volume produk olahan dan tingkat utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) Menengah Besar pada hari Jumat, 31 Januari 2025 di Ruang Rapat Investasi Gedung Mina Bahari III lantai 15. Pertemuan dihadiri perwakilan Direktorat Statistik Industri - Badan Pusat Statistik, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan, Ditjen Industri Agro - Kementerian Perindustrian, Sekretariat Ditjen PDSPKP, dan Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP.



Gambar 21. Pembahasan Populasi UPI Menengah Besar Tahun 2025

- 2) Rapat Finalisasi Perhitungan Volume Produk Olahan dan Utilitas Unit Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. Rapat dipimpin oleh Katimja PUP2MB, dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Statistik Industri BPS, Pusat Data dan Informasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Badan Karantina Ikan, Pusdatin KKP, BPPMHKP, Timja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, Timja PUP2MK, Timja PLKP, Timja Dukman, Tenaga Ahli dari PSKPL IPB, serta anggota timja PUP2MB. Kegiatan tersebut bertujuan memaparkan hasil akhir (prognosa) perhitungan VPO dan Utilitas UPI Skala Menengah Besar serta menjaring masukan dalam upaya penyempurnaannya.
- 3) Rapat Persiapan Sosialisasi Peluang Kerjasama Pemenuhan Pasokan Produk Perikanan Antara Unit Pengolahan Ikan dan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaksanakan pada 7 Maret 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. dihadiri oleh Direktur Pengolahan, Katimja Kerjasama dan Humas, dan Perwakilan Timja Lingkup Dit Pengolahan serta Anggota Timja PUP2MB. Tujuan diadakan rapat untuk memperoleh masukan terkait judul, materi sosialisasi, narasumber, rundown dan mekanisme pelaksanaan serta penyusunan panitia kegiatan.
- 4) Rapat Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi UPI Nilai Tambah Kabupaten Tulungagung dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Maret 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dihadiri perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulungagung, Perwakilan PT. Delta Mina Perkasa selaku Pengelola UPI NT Tulung Agung, dan Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP.
- 5) Rapat Usulan Kerangka Sampling Pendataan Volume Produk Olahan TA 2025 dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2025 di Ruang Rapat Investasi, Gedung Mina Bahari III Lt. 15. Rapat dihadiri oleh

perwakilan dari Pusat Data Statistik dan Informasi, Tim Kerja Data dan Layanan Publik, Setditjen PDSPKP; dan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan, yaitu penetapan populasi dan kerangka sampling pendataan tahun 2025 dan Pemetaan kebutuhan petugas data.

- 6) Rapat Koordinasi Pendataan VPO Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2025 di Ruang Rapat Akses Pasar, Gedung Mina Bahari III, Lantai 15. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Data Statistik dan Informasi, Tim Kerja Data dan Layanan Publik, Setditjen PDSPKP; dan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan yaitu, penyesuaian target kegiatan pendataan VPO pasca efisiensi anggaran,



Gambar 22. Rapat Koordinasi Pendataan VPO Tahun 2025

- f. Penyediaan Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP. Pada Triwulan I kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan persiapan awal serta belum ada pelaksanaan fisik pengadaan maupun penyaluran bantuan. Kegiatan diarahkan pada penyusunan dokumen pendukung, koordinasi lintas unit, serta pelaksanaan monitoring awal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi (monev) pemanfaatan *Chest Freezer*. Monitoring dilakukan antara lain melalui surat nomer B.115/DJPDSPKP.4/PDS.220/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Laporan Kebermanfaatan Bantuan Pemerintah *Chest Freezer* Tahun 2024. Disamping itu juga dilakukan Koordinasi intensif

dengan unit kerja terkait, diantaranya untuk pengadaan melalui e-Katalog. Koordinasi dilakukan melalui Rapat pada tanggal 14 Maret 2025. Dari hasil rapat didapatkan informasi antara lain bahwa saat ini Pengadaan barang/jasa sudah menggunakan aplikasi e-Katalog versi 6. Dalam versi terbaru ini, terdapat perubahan mekanisme kontrak yang dilakukan untuk setiap pengadaan barang/jasa. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian teknis agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan terbaru. Dari hasil monitoring, didapatkan hasil bahwa secara umum *Chest Freezer* telah diterima oleh kelompok dan dimanfaatkan.

- g. Penyediaan Sarana Pengolahan Hasil KP. Pada Triwulan I tahun 2025 sebagaimana kegiatan penyediaan sarana sistem rantai dingin, kegiatan penyediaan sarana pengolahan masih dalam tahap perencanaan dan persiapan awal serta belum ada pelaksanaan fisik pengadaan maupun penyaluran bantuan. Kegiatan diarahkan pada penyusunan dokumen pendukung, koordinasi lintas unit, serta pelaksanaan monitoring awal untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program. Kegiatan Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan melalui surat, rapat koordinasi maupun kunjungan lapang. Monitoring melalui surat dilakukan melalui surat nomer B.114/DJPDSPKP.4/ PDS.220/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Laporan Kebermanfaatan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Tahun 2024, Rapat koordinasi antara lain dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025. Kunjungan lapang dilaksanakan antara lain pada Poklahsar Mina Makmur dan Poklahsar Seger Jaya di Kab. Pati pada tanggal 24 – 25 Maret 2025, Poklahsar Keripik Belut Gavin Jaya di Kab. Magelang pada tanggal 25 – 26 Maret 2025. Dari hasil monitoring, didapatkan hasil bahwa secara umum peralatan pengolahan telah diterima oleh kelompok dan dimanfaatkan.



Gambar 23. Rapat Koordinasi perencanaan dan persiapan awal penyediaan sarana pengolahan

h. Pembinaan Pelaku Usaha Diversifikasi Produk Bernilai Tambah.

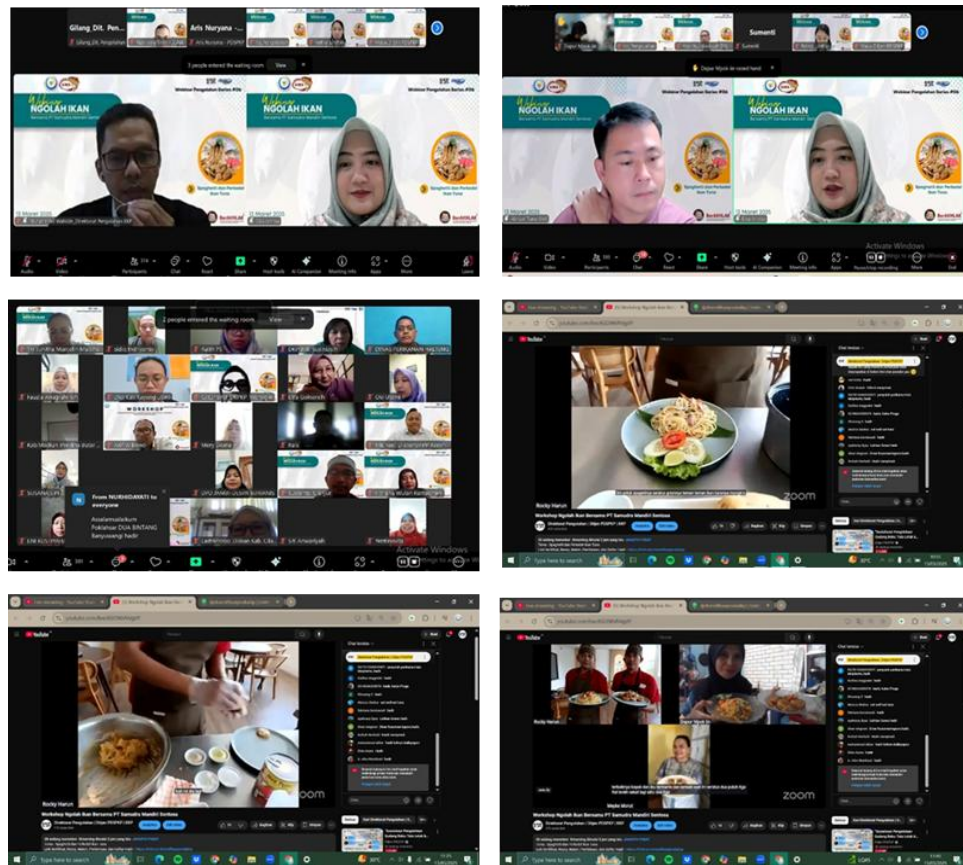
Diversifikasi produk merupakan salah satu upaya untuk menambah nilai hasil perikanan sesuai yang diamanahkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025, yaitu:

- 1) *Workshop* Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan
 - a) *Workshop* Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi mie dan kue glundung HPI dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 secara hibrid di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan dan *zoom meeting* diikuti 330 peserta, dan Pilus Ikan Nila dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025 secara hibrid di Ruang *Workshop* BBP3KP Jakarta serta secara *online* melalui *Zoom meeting* diikuti 429 peserta. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya HPI dan komoditas nila kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan.
 - b) *Workshop* Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan edisi Gohyong Tuna dilaksanakan pada

tanggal 27 Februari 2025 secara hibrid yaitu *offline* di BBP3KP Satker Mataram dan *online* melalui *Zoom meeting*. Selain itu dilaksanakan juga Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi cendol rumput laut dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 secara hibrid yaitu *offline* di BBP3KP Satker Ambon dan *online* melalui *Zoom meeting*. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya komoditas ikan tuna dan rumput laut kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan.

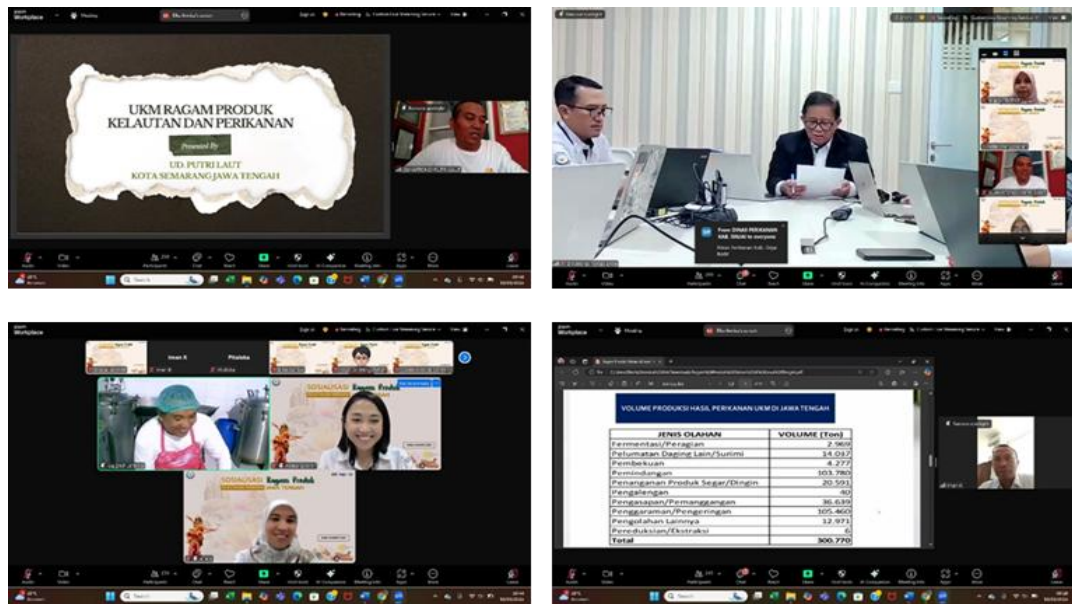
- c) *Workshop* Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah Produk Perikanan Edisi rolade tuna dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2025 secara hibrid yaitu *offline* di BBP3KP Satker Ambon dan *online* melalui *Zoom meeting*. Kegiatan diikuti oleh 502 peserta melalui zoom meeting dan 175 peserta melalui *youtube* yang berasal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, penyuluh perikanan, UKM, akademisi dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya komoditas ikan tuna kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan.
- 2) Webinar Ngolah ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 secara hibrid yaitu *offline* di Restoran PT. Samudra Mandiri Sentosa Kota Bitung Sulawesi Utara dan *online* melalui *Zoom meeting*. Kegiatan diikuti oleh 502 peserta melalui zoom meeting dan 175 peserta melalui *youtube* yang berasal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, penyuluh perikanan, UKM, akademisi dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk

meningkatkan pengetahuan terkait diversifikasi produk perikanan khususnya komoditas ikan tuna kepada masyarakat maupun kelompok pengolah perikanan.



Gambar 24. Webinar Ngolah ikan Bersama PT. Samudra Mandiri Sentosa

- 3) Sosialisasi Ragam Produk Olahan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025 secara *online* melalui *Zoom meeting* dan *youtube*. Kegiatan diikuti oleh 376 peserta melalui *Zoom meeting* yang terdiri atas Dinas Kelautan dan Perikanan, penyuluh perikanan, kelompok pengolah perikanan, dan masyarakat umum. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memperkenalkan produk unggulan daerah Jawa Tengah yang merupakan hasil inovasi dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat umum maupun kelompok pengolah perikanan.



Gambar 25. Sosialisasi Ragam Produk Olahan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

- 4) Pengembangan Hidrolisat Protein Ikan dilaksanakan pada rentang waktu Januari - Maret 2025. Kegiatan dilakukan di UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan yang dibangun pada tahun 2024. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan uji komisioning guna memastikan alat-alat pengolahan Hidrolisat Protein Ikan bekerja dengan baik sesuai *best practice* dan melakukan fortifikasi HPI ke dalam Produk Pangan dan untuk mendukung swasembada pangan,



Gambar 26. Kegiatan Pengembangan Hidrolisat Protein Ikan

ekonomi biru dan pemenuhan gizi melalui protein ikan menuju generasi Indonesia emas.

- 5) Pilot Test Enzim HPI bersama PT. Brenntag dan BBP3KP dilaksanakan pada rentang waktu Januari - Februari 2025. Tujuan pelaksanaan kegiatan untuk melakukan uji coba produksi HPI dengan menggunakan enzim melalui modifikasi perlakuan untuk dapat dilakukan *factory trial* di UPI NT Kota Pekalongan dan diterapkan secara komersil, serta memenuhi standar SNI 9295:2024 HPI.

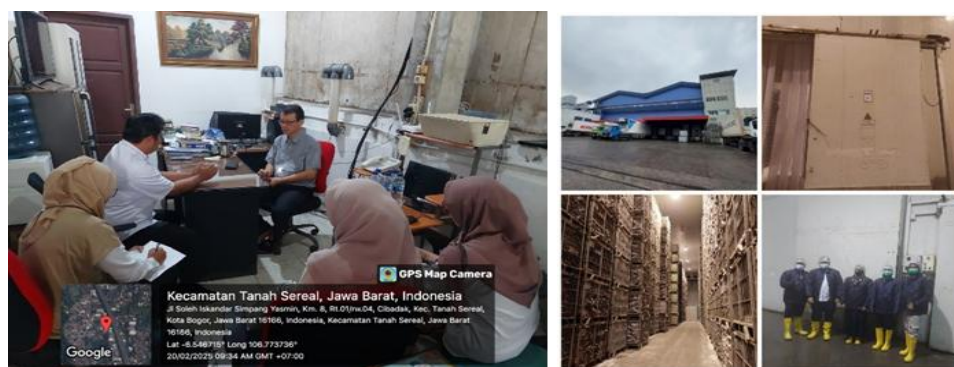


Gambar 27. Pilot Test Enzim HPI bersama PT. Brenntag dan BBP3KP

- i. Pelaksanaan Kemitraan Dalam Rangka Pengadaan, Distribusi dan Penyimpanan dengan dilaksanakannya kesepakatan Bersama antara Koperasi Jasa Sukses Mina Bahari dengan perwakilan pedagang ikan di Pekalongan pada tanggal 11 Maret 2025. Tujuan kesepakatan ini adalah menjamin ketersediaan ruang penyimpanan dan hasil perikanan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, menjamin tercatatnya data keluar masuk stock ikan yang ada di dalam *cold storage* dalam sistem informasi pengelolaan *cold storage* serta penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- j. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pemasukan Hasil Perikanan Berbasis Mekanisme Neraca Komoditas melalui kegiatan Internalisasi Rekomendasi Pemasukan Hasil Pemasukan Hasil Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2025 secara *luring* dan dipimpin

Direktur Logistik dan dihadiri Ketua Kelompok Kerja Lingkup Direktorat Logistik, Penanggung Jawab Kegiatan Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, dan perwakilan Pusdatin dan Pelaksana Tim Kerja Tata Kelola Rantai Pasok, bertujuan untuk Internalisasi Rekomendasi Pemasukan Hasil Pemasukan Hasil Perikanan. Beberapa hal yang dibahas dalam kegiatan yaitu perihal Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan rekomendasi pemasukan hasil perikanan bagi pelaku usaha yang mengajukan usulan rencana kebutuhan dengan peruntukan bahan baku pemindangan, hotel, *restaurant*, *catering* dan pasar modern (*horekapasmod*), umpan, pereduksian/ekstraksi dan pelumatan;

- k. Penyusunan profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP dengan melakukan kunjungan lapang dalam rangka pemetaan profil *Cold storage* di Kabupaten Bogor dan Bekasi, dalam rangka pemutakhiran sebaran gudang beku ikan milik pemerintah dan swasta serta sebagai tindak lanjut hasil validasi nasional data bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) periode Semester I Tahun 2025. Pemutakhiran data profil gudang beku ikan dilaksanakan di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor diantaranya CS Gudang Samudera, PT. Gumuk Joni Sagala (GJS) Leuwiliang, CV. Samudera Sentosa. Selain itu, pemutakhiran data profil gudang beku ikan dilaksanakan di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi diantaranya, PT Ariake Europe Indonesia, PT Eka Sari Perkasa dan PT Samudera Indonesia Coldstorindo.



Gambar 28. Kegiatan Penyusunan Profil Ketersediaan dan Kebutuhan Hasil KP

1. Persentase bahan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) hasil kelautan dan perikanan yang diusulkan untuk dirumuskan oleh Komite Teknis telah tercapai 25% pada periode triwulan 1. Terdapat 4 (empat) judul Bahan RSNI sudah sampai pada tahapan proses RSNI0, diantaranya (1) Revisi SNI 8646:2018 Kerupuk ikan, udang dan moluska Siap Makan, (2) Revisi SNI 7661:2019 Pempek, (3) Revisi SNI 7689: 2013 Agar-agar Kertas dan (4) Revisi SNI 2346:2015 Pedoman pengujian sensori pada produk perikanan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan I diantaranya:
 - 1) Rapat *refreshment* bagi konseptor dan editor RSNI produk perikanan tanggal 11 Februari 2025 melalui aplikasi *zoom meeting*.
 - 2) Rapat penyiapan bahan RSNI tanggal 20 Februari 2025 secara *hybrid* melalui aplikasi *zoom meeting* dan RR Surimi BBP3KP. Pada kegiatan ini konseptor menyampaikan draf RSNI0 yang telah disusun.



Gambar 29. Kegiatan penyiapan Bahan RSNI

- 3) Rapat penyusunan konsep RSNI1 produk perikanan TA 2025 tanggal 26 - 27 Februari 2024 secara daring.
 - 4) Pengiriman sampel agar-agar kertas yang terdiri dari 4 sampel dengan merk lingkaran organik, agar-agar cap Apel, agar-agar cap Bintang Melon, dan agar-agar cap Mangga Dua Putra. Sampel dimasukkan ke Laboratorium BBP3KP untuk diuji parameter kadar air.



Gambar 30. Dokumentasi sampel agar-agar kertas

- 5) Pengiriman surat permintaan data dan informasi pengujian terkait hasil pengujian produk: 1) Kerupuk ikan udang dan moluska Siap Makan; 2) Pempek; 3) Dodol Rumput Laut; 4) Tuna Loin Segar; 5) Tuna Loin Beku; dan 6) Agar-agar Kertas produk ke Unit Layanan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Daerah.
 - 6) Pengumpulan data primer dan sekunder dari pengujian sampel produk, basis data laboratorium BBP3KP, dan berbagai macam sumber literatur, yang dapat dipergunakan oleh konseptor untuk dijadikan referensi tambahan dalam proses penyusunan RSNI.
- m. Produk kelautan dan perikanan yang mendapatkan SPPT SNI dan/ atau Sertifikat Kesesuaian telah tercapai 10 produk. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian diatas, diantaranya:
- 1) Evaluasi resertifikasi produk tuna dalam kemasan kaleng merek Frabelle, Isabella, Sinar, Pantai Manado dan Tuna Royale yang diproduksi oleh PT Sinar Pure Foods International tanggal 6-9 Januari 2025.
 - 2) Surveilans produk sarden dan makerel dalam kemasan kaleng dengan merek Aliya, Hoya dan LSC yang diproduksi oleh PT Artha Sumatera Abadi di Medan, Sumatera Utara tanggal 16-17 Januari 2025.



Gambar 31. Surveilans produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng PT Artha Sumatera Abad

- 3) Evaluasi sertifikasi untuk produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng merek MOGA untuk PT Interfood Sukses Jasindo yang diproduksi oleh Fujian Xingguang Foods Co., Ltd dilaksanakan tanggal 17-21 Maret 2025.
 - 4) Kaji ulang permohonan untuk PT Mata Gunung Althazor untuk produk tuna dalam kemasan kaleng dengan merek Kita Laut, PT Interfood Sukses Jasindo untuk produk sarden dan makarel dalam kemasan kaleng dengan merek Moga, PT Rezeki Inti Artha untuk produk tuna dalam kemasan kaleng dengan merek Wilmond, serta resertifikasi PT Samudera Mandiri Sentosa untuk produk tuna dalam kemasan kaleng dengan merek SMS.
 - 5) Koordinasi terkait sertifikasi ulang/resertifikasi terhadap beberapa klien LSPPro-HP untuk mengajukan permohonan Sertifikasi ulang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku sertifikat kesesuaian berakhir.
- n. Produk kelautan dan perikanan yang memenuhi standar pengujian telah tercapai 53 produk dari 60 produk kelautan dan perikanan yang diuji. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian diatas, diantaranya:
- 1) Pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian sesuai ISO/IEC 17025:2017 dengan dilaksanakannya a) perencanaan kegiatan pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium pada 22 Januari 2025, dan b) pendaftaran reakreditasi

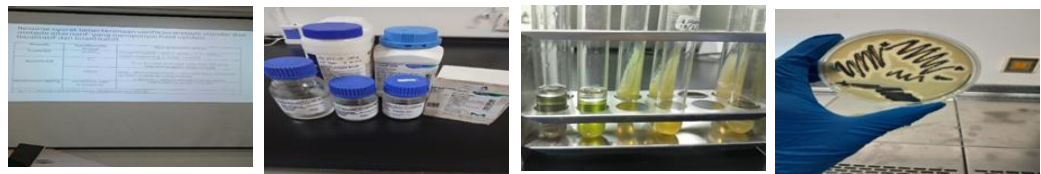
dan mengunggah dokumen persyaratan reakreditasi melalui *website* KAN versi 2.2

- 2) Perencanaan kegiatan pemeliharaan panelis standar tanggal 22 Januari 2025.
- 3) Pengujian sensori pada sampel pemeliharaan ruang lingkup untuk produk fillet patin dan udang berlapis tepung beku tanggal 31 Januari 2025.
- 4) Pengujian sensori pada sampel pemeliharaan ruang lingkup yaitu tuna kaleng dalam rangka pemeliharaan panelis standar.



Gambar 32. Pengujian sensori tuna kaleng

- 5) Verifikasi metode pengujian *Staphylococcus aureus* ISO 6888.1:2021.



Gambar 33. Gambar 33. Verifikasi metode pengujian *Staphylococcus aureus*

- 6) Rapat pembahasan dalam rangka verifikasi metode pengujian sensori/organoleptik sehubungan dengan adanya revisi SNI 2346:2015 Pedoman Pengujian Sensori pada Produk Perikanan.
 - 7) Melengkapi ketidaksesuaian audit dokumen dan rekaman yang telah diunggah di *website* KAN versi 2.2 dalam rangka pemeliharaan sistem manajemen dan persyaratan teknis produsen bahan acuan SNI ISO/IEC 17034.
- o. Inkubasi Bisnis bagi UMKM Kelautan Perikanan (BBP3KP)

- 1) Penyusunan rencana kegiatan, baik berupa pendampingan maupun fasilitasi kepada 9 (sembilan) tenant yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran 2025.
- 2) Menyusun Tim Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari perwakilan dari Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP.
- 3) Melakukan seleksi administrasi calon tenant Inbis Invapro KP tahun 2025, dari sejumlah 38 tenant yang mendaftar untuk dibina terdapat 26 tenant yang memenuhi persyaratan administrasi. Tenant yang lolos seleksi administrasi tersebut selanjutnya dinilai performanya dan mendapatkan hasil penilaian sebanyak 26 tenant sesuai kriteria.
- 4) Penilaian komitmen terhadap calon tenant inbis Invapro KP. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Tim Inbis Invapro KP. Dari 26 UMKM yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan nilai performa, terdapat 9 UMKM yang memiliki komitmen tertinggi untuk ditetapkan sebagai tenant Inbis Invapro KP. Selanjutnya akan disampaikan surat pemberitahuan penetapan kepada tenant dan Dinas KP Pembina melalui surat penetapan kepala BBP3KP.
- 5) Profiling kebutuhan serta pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan mitra UMKM Satker BBP3KP Palabuhanratu sesuai dengan ruang lingkup tugas Satker BBP3KP Palabuhanratu, salah satunya adalah profiling kebutuhan pendampingan bagi 14 mitra UMKM.



Gambar 34. Profiling kebutuhan pendampingan bagi 14 mitra UMKM Satker BBP3KP Palabuhanratu

- 6) Fasilitasi dan Pendampingan Pengembangan UMKM oleh Satker BBP3KP Ambon pada UMKM sesuai dengan ruang lingkup kerja Satker Ambon.
- p. Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Bernilai Tambah (BBP3KP)
- 1) Penyusunan SK Tim Kegiatan fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
 - 2) Penyampaian surat usulan Calon Peserta Penerap Pengembangan Produk KP Bernilai Tambah kepada 6 Dinas KP Kab/Kota antara lain Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Provinsi Jakarta; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor; Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Bogor; Dinas Perikanan Kab. Bekasi; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan. Terdapat 71 UMKM yang telah mendaftar sebagai calon peserta penerap pengembangan produk KP bernilai tambah.
 - 3) Sosialisasi kegiatan pendampingan penerapan pengembangan produk KP yang diselenggarakan secara hybrid daring dan luring di BBP3KP tanggal 17 Januari 2025.



Gambar 35. Sosialisasi kegiatan pendampingan penerapan pengembangan produk kelautan dan perikanan

- 4) Rapat persiapan *workshop* pengembangan diversifikasi dan nilai tambah tahun 2025 yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 16 Januari 2025 di GMB lantai 13 KKP.



Gambar 36. Rapat persiapan workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah tahun 2025

- 5) Melaksanakan seleksi administrasi calon peserta Penerap Pengembangan Produk KP Bernilai Tambah hasil usulan Dinas KP.
- 6) Melaksanakan verifikasi data, penilaian komitmen dan rencana pengembangan produk yang diusulkan oleh UMKM calon peserta pendampingan penerapan pengembangan produk KP melalui wawancara secara *online* yang dilaksanakan tanggal 13 Februari 2025.
- 7) Pelatihan diversifikasi produk olahan ikan tanggal 12 Februari 2025 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dan BBP3KP bertindak sebagai narasumber dengan materi pengolahan yaitu Mantao ikan dan *Fish Chips* yang dihadiri 30 peserta dari ibu-ibu penggerak PKK di wilayah Kota Bogor.



Gambar 37. Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Ikan yang Diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor

- 8) Kegiatan pelatihan diversifikasi pelatihan olahan HKP yg dilaksanakan di Aula Ds. Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi tanggal 21 Februari 2025. Materi pelatihan adalah gohyong ikan tuna dan sirup rumput laut yang diikuti oleh 35 peserta yang berasal dari TP

PKK Kec Cibitung / Ds. Cibuntu & Kader posyandu Desa Cibuntu, Kec Cibitung.

- 9) Pengolahan produk perikanan untuk konten media sosial, diantaranya ikan krispi bumbu teriyaki, tuna bumbu sate, sirup rumput laut, gohyong ikan, dimsum ikan, es kopyor rumput laut, kue garpu, boba rumput laut, siomay, otak-otak, es krim rumput laut, samosa, takoyaki, *fish cone*, *fish chips*, stik ikan, cendol rumput laut dan es lumut rumput laut.
- 10) Penilaian komitmen dan rencana pengembangan produk hasil verifikasi data (hasil wawancara kepada calon peserta pendampingan penerapan pengembangan produk KP) yang telah dilaksanakan guna penetapan peserta pendampingan penerapan pengembangan produk KP tahun 2025.
- 11) Penetapan 12 UMKM yang akan diusulkan menjadi penerap PPNT Tahun 2025.
- 12) Mempersiapkan rencana kegiatan *workshop* teknik pengolahan dan pemasaran dalam rangka pendampingan penerapan pengembangan produk KP tahun 2025
- 13) Penerimaan kunjungan ASPRINDO (Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia) tanggal 12 Maret 2025 sebagai bentuk kegiatan kerjasama teknologi pengolahan dan pemasaran.



Gambar 38. Kunjungan ASPRINDO ke BBP3KP

- q. Diseminasi Masyarakat pada Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP)

- 1) Peliputan dan penyusunan konten media sosial terkait pelatihan *fillet* ikan nila dan lele tanggal 14 Januari 2025 di *Workshop* BBP3KP.



Gambar 39. Peliputan dan konten media sosial terkait pelatihan fillet ikan nila dan lele

- 2) Peliputan dan penyusunan konten media sosial terkait *workshop* pengembangan diversifikasi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan edisi mie dan kue glundung fortifikasi HPI tanggal 23 Januari 2025 di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Penyebarluasan informasi melalui Bazar Produk Perikanan dan Kuliner bulan Januari 2025 tanggal 9-10 Januari 2025 di Area Parkir GMB III KKP Jakarta.



Gambar 40. Penyebarluasan informasi pada bazar produk perikanan dan kuliner bulan Januari

- 4) Menerima dan menjawab pengaduan berupa pertanyaan masyarakat melalui email bbp3kp@kkp.go.id dan *direct message* media sosial (Instagram) pada periode Januari-Maret 2025.
- 5) Penyusunan 10 (sepuluh) konten media sosial pada periode Februari.



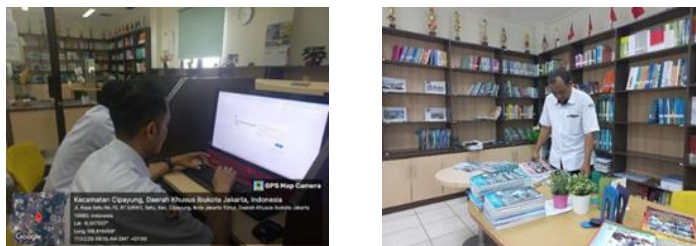
Gambar 41. Contoh konten media sosial

- 6) Penyebarluasan informasi melalui Bazar Produk Perikanan dan Kuliner bulan Februari 2025 tanggal 7 Februari 2025 di Area Parkir GMB III KKP Jakarta.



Gambar 42. Penyebarluasan informasi pada bazar produk perikanan dan kuliner bulan Februari

- 7) Menyediakan bahan bacaan/ pustaka yang dapat diakses langsung ke Perpustakaan Kantor BBP3KP.



Gambar 43. Kegiatan tim pengelola perpustakaan BBP3KP

- 8) Peliputan atau pengambilan gambar dalam rangka penyusunan bahan informasi dilaksanakan pada kegiatan Webinar Series SNI Produk Perikanan: SNI Didapat, UMKM Hebat” tanggal 5 Maret

2025, Kampanye Protein Ikan tanggal 17 Maret 2025 di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Bogor, dan video ucapan Idul Fitri di BBP3KP Jakarta.



Gambar 44. Peliputan atau pengambilan gambar dalam rangka penyusunan bahan informasi

- 9) Penyusunan bahan informasi untuk konten media sosial sebanyak 12 (dua belas) konten media sosial pada periode Maret.



Gambar 45. Contoh Konten Media Sosial Maret 2025

- 10) Penyebarluasan informasi melalui kegiatan Webinar Series SNI Produk Perikanan: "SNI Didapat, UMKM Hebat".



Gambar 46. Webinar Series SNI Produk Perikanan: "SNI Didapat, UMKM Hebat"

- 11) Penyebarluasan informasi melalui Safari Ramadhan dalam rangka Kampanye Protein Ikan tanggal 17 Maret 2025 di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Ciseeng, Bogor.



Gambar 47. Penyebarluasan Informasi melalui Kampanye Protein Ikan di Pondok Pesantren Riyadlul Jannah Ciseeng, Bogor

- 12) Penyebarluasan informasi melalui penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi pengunjung/penerima informasi pada media digital (LED Banner) yang ditampilkan di Lobi Kantor BBP3KP.



Gambar 48. Tampilan SKM Digital pada LED Banner

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp 103.302.576.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp 1.227.402.000,- atau setara dengan 1,19%.

D. Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas

Usaha mikro dan usaha kecil bidang pengolahan produk KP yang meningkat skalanya dihitung berdasarkan 6 aspek usaha (legalitas, peningkatan omset, peningkatan aset, peningkatan produksi, perluasan pasar, peningkatan tenaga kerja). Berdasarkan Kepdirjen PDSPKP No 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Naik Kelas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, penetapan kelas usaha dari pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan diperoleh dari total pembobotan, dengan rincian:

- a. Kelas Mikro, merupakan kelas terbawah dengan batas nilai skoring 0 sampai dengan 50;
- b. Kelas Kecil, dengan batas nilai skoring 51 sampai dengan 70;
- c. Kelas Menengah, dengan batas nilai skoring 71 sampai dengan 100.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas (%)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas tahun 2025 ditargetkan mencapai 5%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat semester, dan capaiannya akan diukur pada semester I dan pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Fasilitasi Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran. Dalam memfasilitasi Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran telah dilaksanakan

kegiatan Rapat Verifikasi Kelengkapan Standar Usaha Pemasaran Ikan sebagai berikut :

- 1) Rapat verifikasi pada tanggal 10 Januari 2025 dalam rangka Menindaklanjuti Permohonan Penerbitan Sertifikat Standar atas nama PT. Agro Boga Utama, PT. Aneka Biota Laut, dan PT. Kongkie Malindo Jaya;
- 2) Rapat verifikasi pada tanggal 17 Januari 2025 dalam rangka Menindaklanjuti Permohonan Penerbitan Sertifikat Standar atas nama PT. DPO Indonesia, PT. Indo Lautan Makmur, PT. Samudra *Seafood* Pacific, dan PT. Hanla Washing
- 3) Rapat verifikasi pada tanggal 14 Maret 2025 dalam rangka Menindaklanjuti Permohonan Penerbitan Sertifikat Standar atas nama PT. Hasil Indo Sejahtera, PT. Philips *Seafood* Indonesia, kegiatan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha.



Gambar 49. Rapat Verifikasi Kelengkapan Standar Usaha Pemasaran Ikan
b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha pada Lembaga Usaha KP.
Pada triwulan I, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

- 1) Inisiasi Kerjasama Koperasi dengan Unit Pengolahan Ikan pada tanggal 19 Februari 2025. Direktorat Pemberdayaan Usaha melaksanakan kegiatan inisiasi kerja sama antara koperasi binaan, yaitu Koperasi Produsen Udang Pansela Kebumen dan Koperasi

Produsen Berkah Rajungan Nusantara, dengan PT. Graha Makmur Cipta Pratama selaku pelaku usaha pengolahan dan ekspor. Kegiatan ini bertujuan menjajaki peluang kemitraan untuk memperkuat akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan koperasi. Koperasi Produsen Udang Pansela memiliki kapasitas produksi 120–150 ton/bulan dan menyewa UPI untuk pengupasan serta pembekuan udang. Kendala utama adalah fluktuasi harga dan belum adanya kontrak kerja sama dengan UPI. Sementara itu, Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara telah memiliki miniplant dengan kapasitas 100 kg bahan baku/hari, namun membutuhkan akses ke pasar yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif. PT. Graha Makmur Cipta Pratama menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama melalui perjanjian kontrak dengan spesifikasi bahan baku yang disepakati. Divisi udang memiliki empat unit pengolahan di berbagai daerah dengan sistem pembayaran 30 hari, sedangkan divisi rajungan menyediakan armada penjemputan dan pembayaran maksimal satu minggu. Kedua pihak sepakat melakukan kunjungan lapangan guna melihat proses budidaya dan pengolahan secara langsung sebagai langkah awal kerja sama.

- 2) Penguatan Kelembagaan Usaha Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara pada tanggal 6 Maret 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan koperasi serta bentuk intervensi yang diperlukan guna meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja kelembagaan. Saat ini, koperasi memproduksi sekitar 30 kg daging rajungan per hari dari 100 kg bahan baku, dengan kapasitas maksimum mencapai 350 kg bahan baku per hari. Produksi menurun akibat musim baratan yang menyebabkan nelayan tidak melaut dan terjadi persaingan harga dengan pengepul lain. Koperasi merencanakan penambahan lima orang picker dan memerlukan tambahan modal sekitar Rp100 juta untuk pembelian bahan baku

pada musim panen, karena sistem pembayaran dari UPI membutuhkan waktu 2–3 hari.

3) Inventarisasi Kebutuhan Lembaga Usaha serta Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan Usaha pada tanggal 13 Maret 2025. Kegiatan inventarisasi kebutuhan lembaga usaha serta monitoring dan evaluasi keberlanjutan usaha sebagai bagian dari upaya pengembangan kelembagaan. Berikut adalah hasil dari inventarisasi kebutuhan lembaga usaha:

- a) Koperasi Produsen Putra Mina Laut memiliki 20 anggota aktif dengan fokus pada produksi dan pemasaran teri krispi dan abon ikan, namun menghadapi kendala keberlanjutan bahan baku dan belum melaksanakan RAT dalam dua tahun terakhir.
- b) Koperasi Umami Jaya Sejahtera Banyuwangi yang memproduksi berbagai olahan perikanan dengan total produksi 700 kg/bulan, menghadapi permasalahan modal, distribusi, dan gudang penyimpanan.
- c) Koperasi Produsen Mina Permata Biak Pasifik merupakan koperasi nelayan dengan hasil tangkapan hingga 1,5 ton per bulan, namun terkendala pada SDM pengelolaan keuangan dan belum memiliki fasilitas gudang beku.
- d) Koperasi Produsen Bintang Jaya Sejahtera Blitar dengan 20 anggota pengolah dan pemasar produk perikanan masih belum optimal menjalankan fungsi koperasi, namun telah melaksanakan RAT dan berencana mengembangkan produk unggulan koperasi.
- e) Koperasi Pemasaran Mina Mulya Tenggak yang beranggotakan pembudidaya ikan patin dengan produksi hingga 19 ton per bulan belum memiliki akses pasar yang memadai dan berharap dapat menjadi agen pemasaran serta supplier pakan dan peralatan.

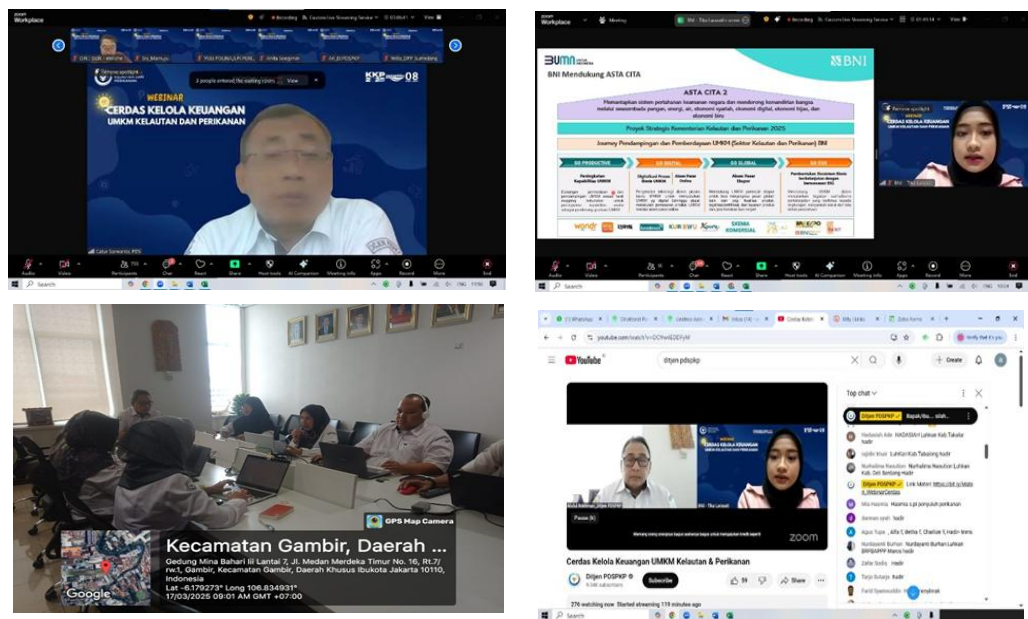
- f) Koperasi Konsumen Dermasandi Maju Bersama yang terdiri dari 8 poklamsar dengan 120 anggota, fokus pada penyediaan peralatan usaha pemindangan dan tengah mempersiapkan RAT perdana, namun menghadapi kendala SDM, permodalan, dan kebutuhan gudang beku.
- 4) Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Pengolahan Ikan Asin di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara pada tanggal 14 Maret 2025. Kegiatan penguatan kelembagaan pelaku usaha pengolahan ikan asin di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sebagai tindak lanjut rencana kerja sama antara Ditjen PDSPKP dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penguatan dilakukan melalui koordinasi dengan penyuluh Kelautan dan Perikanan setempat, dengan langkah awal berupa bantuan pengurusan NIB. Namun, kepemilikan lahan menjadi tantangan utama karena pelaku usaha umumnya merupakan pendatang dan menempati lahan milik PUPR dan Pelindo. Kegiatan yang mengharuskan kehadiran bersama pelaku usaha menghadapi kendala waktu karena bersamaan dengan jadwal produksi. Dalam hal akses pembiayaan, minat cukup tinggi namun terbentur pada persoalan jaminan dan BI *checking* akibat kepemilikan aset yang tidak sah dan riwayat kredit di daerah asal. Hingga kini, baru dua pengolah ikan asin berskala besar yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), yaitu Bapak Herman dan Bapak Sodikin, karena diwajibkan oleh mitra UPI. Untuk meningkatkan pemahaman dan keberhasilan fasilitasi pembiayaan, disarankan agar KUB/poklamsar Kalibaru difasilitasi bertemu dengan pelaku usaha dari daerah lain yang telah berhasil mengakses kredit usaha.



Gambar 50. Penguatan kelembagaan pelaku usaha pengolahan ikan asin di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara pada tanggal 14 Maret 2025

c. Fasilitasi UMKM KP pada Akses Pembiayaan dan Kemitraan Usaha. Dalam memfasilitasi UMKM KP pada akses pembiayaan telah dilaksanakan kegiatan :

- 1) Fasilitasi akses pembiayaan kepada penerima bantuan gudang beku berpendinginan tanggal 6 Februari 2025, di Kabupaten Garut tanggal 13 Februari 2025 dan di Cilincing Jakarta Utara tanggal 20 Maret 2025, ketiga kegiatan tersebut dilakukan secara daring melalui media *Zoom*.
- 2) Kegiatan Sosialisasi literasi keuangan pada tanggal 17 Maret 2025 melalui media *Zoom* dan *Youtube* yang diikuti oleh 1748 Peserta. Adapun *output* dari kegiatan ini adalah 27 UMKM telah terfasilitasi akses pembiayaan kredit program.



Gambar 51. kegiatan Fasilitasi UMKM KP pada Akses Pembiayaan dan Kemitraan

d. Penumbuhan dan Pembinaan Wirausaha KP

- 1) Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 dan 17 Maret 2025. Kegiatan tersebut mengundang Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Jakarta Utara, UMKM pengolah hasil perikanan di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, UMKM pengolah hasil perikanan dan kelautan yang menjadi target UMKM Naik Kelas serta Dinas Kelautan dan Perikanan daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan sehingga dapat ditentukan aspek yang akan dibina untuk meningkatkan omsetnya.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas sebesar Rp7.619.000.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp54.901.000,- atau setara dengan 0,72%.

Sasaran Program 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan Ditjen PDSPKP

E. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan, dan pengadaan barang/jasa.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2025	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	S.d TW I 2025			TW IV 2024	TW I 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 ditargetkan mencapai 86. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja implementasi reformasi birokrasi antara lain:

a. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, peraturan menteri yang akan disusun Ditjen PDSPKP tahun 2025 meliputi:

- 1) Rancangan Peraturan Menteri tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan; dan
- 2) Rancangan Peraturan Menteri tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan.

Selain penyusunan peraturan menteri, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2025, KKP melalui Ditjen PDSPKP juga melakukan penyusunan peraturan presiden yaitu Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan. Pada triwulan I telah dilakukan beberapa kali pembahasan baik lingkup internal Ditjen PDSPKP maupun antar eselon I lingkup KKP sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Rencana Aksi GEMARIKAN, tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan undangan no B.403/DJPDSPKP.1/HK.150/I/2025;
- 2) Tindak lanjut pembahasan RPerpres GEMARIKAN, tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan undangan no B.1373/DJPDSPKP.1/TU.330/II/2025;
- 3) Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) tanggal 4 Februari 2025 berdasarkan undangan nomor B.1374/DJPDSPKP.1/TU.330/II/2025;
- 4) Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) lanjutan substansi Ditjen PDSPKP, tanggal 13 Februari berdasarkan undangan no B.1959/DJPDSPKP.1/TU.330/II/2025;

- 5) Pembahasan GEMARIKAN, tanggal 12 Maret 2025 berdasarkan undangan no B.3058/DJPDSPKP.1/TU.330/III/2025;
 - 6) Pembahasan Sinkronisasi Rencana Aksi GEMARIKAN, tanggal 13 April 2024 berdasarkan undangan no B.3802/DJPDSPKP.1/TU.330/IV/2025.
- b. Pelayanan Bantuan Hukum lingkup Ditjen PDSPKP

Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP adalah masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kelautan dan Perikanan khususnya pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Advokasi hukum meliputi bantuan hukum dan pembinaan hukum.

Beberapa pelayanan bantuan hukum yang ditangani oleh Ditjen PDSPKP pada Triwulan I di antaranya:

- 1) Pendampingan pemenuhan permintaan dokumen terkait pengadaan Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran (*Coolbox*) Tahun Anggaran 2024 oleh Polda Metro Jaya Nomor B/1331/II/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus pada tanggal 26 Februari 2025
- 2) Pendampingan pemenuhan permintaan dokumen Bantuan Pemerintah Gudang Beku Portabel Tahun Anggaran 2024 oleh Polda Metro Jaya Nomor B/534/II/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus pada tanggal 11 Februari 2025

- 3) Pendampingan pemenuhan permintaan dokumen Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portabel Tahun Anggaran 2024 oleh Polda Metro Jaya Nomor B/1331/II/RES.3.3/2025/Ditreskrimsus pada tanggal 26 Februari 2025
 - D. Pendampingan atas pemanggilan oleh Polda Metro Jaya berkaitan dengan Laporan PD Sarana Jaya kepada PT. Putra Kirana Sentosa perihal Pasar Ikan Higienis Pejompongan tanggal 24 Februari 2025. Pada tanggal 18 Maret 2025 dilakukan mediasi yang di inisiasi oleh Polda Metro Jaya, yang pada intinya disampaikan bahwa PIH Pejompongan masih dalam proses penyerahan hibah dari BMN menjadi BMD kepada Pemda DKI, apabila belum selesai proses hibah, maka status PIH Pejompongan masih sebagai BMN yang dimiliki oleh KKP dalam hal ini Ditjen PDSPKP, sehingga Ditjen PDSPKP masih memiliki kewenangan untuk menunjuk pengelola pada masa transisi sebelum hibah berpindah kepada Pemda DKI.
 - E. Penelaahan piutang PT Perindo. Hasil pembahasan Ditjen PDS dengan BPK dan PT PERINDO pada tanggal 12 Februari 2025 berkaitan dengan piutang PT PERINDO yang diperlukan adanya telaah hukum. Tim Kerja Hukum Ditjen PDSPKP telah melakukan telaah hukum dan telah bermohon telaah kepada Biro Hukum berkaitan dengan substansi ini.
- c. Kegiatan Humas lingkup Ditjen PDSPKP
- Kegiatan humas dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi, antara lain:
- 1) Penerbitan siaran pers terkait program dan kegiatan Ditjen PDSPKP beserta pemberitaannya di media massa sebanyak 19 (sembilan belas) siaran pers;
 - 2) Melaksanakan dokumentasi dan peliputan kegiatan Ditjen PDSPKP beserta agenda pimpinan untuk dipublikasikan melalui media sosial/kanal informasi lainnya, misalnya peliputan pimpinan dalam

rakor pangan, kunjungan kerja DPR RI, Kampanye Protein Ikan, pertemuan koordinasi dengan K/L terkait, dan live wawancara dengan Media;

3) Kegiatan pelayanan informasi PPID, antara lain:

- a) Penilaian Presentasi Uji Publik Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KKP pada 23 Januari 2025.
- b) Penetapan Sekretariat PPID Ditjen PDSPKP Tahun 2025 melalui Keputusan Dirjen PDS No. 4 Tahun 2025.
- c) Menyusun Daftar Informasi Publik yang wajib diumumkan (informasi berkala, setiap saat dan serta merta) dan yang dikecualikan.
- d) Pengusulan Tim Teknis Layanan Informasi Publik KKP Tahun 2025.
- e) Melakukan pelayanan PPID baik secara *offline* maupun *online*.

4) Penyusunan agenda setting dan kalender event Ditjen PDSPKP

5) Untuk meningkatkan fungsi kehumasan khususnya dalam hal publikasi bahan kebijakan kepada masyarakat, Ditjen PDSPKP telah menjajaki rencana kerja sama publikasi bidang penguatan daya saing dengan PT Elang Mahkota Teknologi, Tbk (Emtek) sebagai media partner, namun karena adanya kebijakan efisiensi menyebabkan kerja sama tersebut tidak dapat dilaksanakan tahun ini.

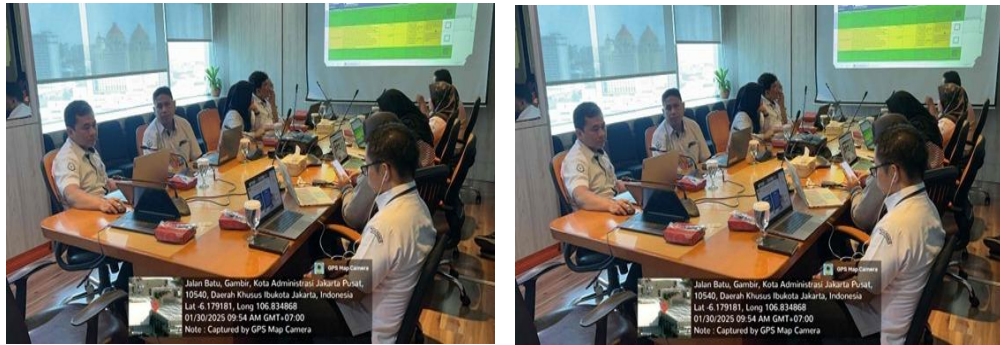
d. Kegiatan Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP

Beberapa kegiatan dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi yaitu:

- 1) Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;

- 2) Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 7 Tahun 2025;
 - 3) Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal PDSPKP Nomor 8 Tahun 2025;
 - 4) Menghadiri rapat pembahasan rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Aksi Pembangunan Integritas KKP Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 februari 2025;
 - 5) Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan Januari, Februari dan Maret 2025 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas. Laporan penanganan pengaduan juga telah disampaikan kepada Inspektorat V selaku Tim Penanganan Pengaduan Kementerian secara berjenjang;
 - 6) *Public Campaign* Pengendalian Gratifikasi melalui penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal PDSPKP Nomor B.914/DJPDSPKP/HK.170/III/2025 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya di Lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;
 - 7) Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik Tahun 2025 pada tanggal 13 Maret 2025;
 - 8) Seluruh pegawai Ditjen PDSPKP telah melakukan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) baik melalui LHKPN maupun SPT Pajak secara tepat waktu
- e. Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan lingkup Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, beberapa kegiatan persuratan, tata usaha, dan kearsipan yang telah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pada tanggal 30 Januari 2025;



Gambar 52. Sosialisasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

- 2) Pelaksanaan kegiatan verifikasi penyerahan arsip statis sistem logistik ikan nasional pada tanggal 18 Februari 2025 di Jakarta



Gambar 53. Verifikasi penyerahan arsip statis sistem logistik ikan nasional

- 3) Pelaksanaan *dashboard* kinerja kearsipan tanggal 20 Maret 2025



Gambar 54. Pelaksanaan dashboard kinerja kearsipan

f. Layanan data dan Informasi

Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan data dan informasi dalam rangka mendukung implementasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pembahasan kerangka sampling Satu Data Bidang PDSPKP Tahun 2025, pada tanggal 20 Januari 2025;
- 2) Rapat pendataan Informasi Geospasial Tematik Bidang PDPSKP, pada tanggal 24 Januari 2025;
- 3) Rapat koordinasi Informasi Geospasial Bantuan Pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP, pada tanggal 5 Februari 2025; dan
- 4) Rapat Pembahasan Metode Pendataan Satudata Bidang PDSPKP Pasca Efisiensi Anggaran, pada tanggal 24 Februari 2025



Gambar 55. Rapat Pembahasan Metode Pendataan Satudata Bidang PDSPKP Pasca Efisiensi Anggaran, 24 Februari 2025

g. Layanan Perencanaan, Pengembangan, Kinerja, dan Pembinaan Disiplin Pegawai lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka mendukung implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi, beberapa kegiatan yang berkaitan dengan kepegawaian diantaranya sebagai berikut:

- 1) Verifikasi dan Supervisi Berkas pada Seleksi Administrasi Pengadaan PPPK KKP T.A. 2024 Tahap II pada tanggal 7 Januari 2025.
- 2) Pembahasan Penyelarasan Jabatan Fungsional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 22 Januari 2025.

- 3) Rapat Perumusan Penyelarasan Jabatan Fungsional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 6 Februari 2025
- h. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran lingkup Ditjen PDSPKP
Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut,
 - 1) Rapat Laporan Keuangan Tahun 2024 dan Kegiatan Tahun 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2025.
 - 2) Rapat Pembahasan Matriks Usulan Buka Blokir dan Data Dukung Usulan Revisi, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025.
 - 3) Rapat Pembahasan Identifikasi Self-Assessment Efisiensi Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2025.



Gambar 56. Rapat Pembahasan Identifikasi Self-Assessment Efisiensi Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP TA 2025

- 4) Rapat Pembahasan Matrik Usulan Revisi Efisiensi Anggaran Pasca Penetapan Pagu Efisiensi per Eselon I, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025
- 5) Rapat Pembahasan Kegiatan Ditjen PDSPKP Pasca Efisiensi, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025



Gambar 57. Rapat Pembahasan Kegiatan Ditjen PDSPKP Pasca Efisiensi

- i. Kegiatan Pemantauan Pelaporan, dan Evaluasi Program/Kegiatan lingkup Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi diantaranya adalah rapat monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025. Kegiatan bertujuan untuk mengetahui operasionalisasi pemanfaatan bantuan pemerintah yang telah disalurkan Ditjen PDSPKP



Gambar 58. Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2024

- j. Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengendalian Internal lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator implelementasi reformasi birokrasi, telah dilaksanakan kegiatan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengendalian internal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan periode Semester II Tahun Anggaran 2024 (*Unaudited*) Lingkup Ditjen PDSPKP diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 Januari 2025. *Output* kegiatan ini yaitu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tingkat Eselon 1

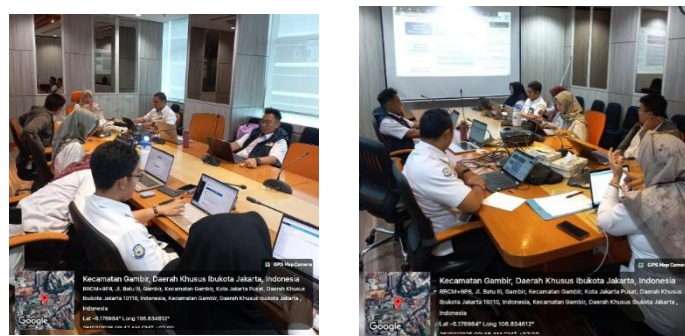
Semester I Tahun 2024 (*Unaudited*) serta Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Tingkat Satker dan UPT Semester I Tahun 2024 (*Unaudited*);

- 2) Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024



Gambar 59. Pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024

- 3) Melaksanakan monitoring capaian IKPA pada pengisian Capaian *Output* periode Triwulan IV tahun 2024 dengan seluruh Satker Tugas Pembantuan (TP) lingkup Ditjen PDPSKP pada tanggal 8 Januari 2025, kegiatan monitoring dilakukan secara daring dan diikuti oleh 38 Satker TP
- 4) Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2025 berdasarkan pada akun 51, 52 dan 53 pada Satker Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan, guna menghindari terjadinya deviasi pada Halaman III DIPA tidak melebihi (kurang/lebih) sebesar 5 % (lima persen)



Gambar 60. Pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) tahun 2025

- 5) Melaksanakan pembahasan penyusunan Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 yang diadakan pada tanggal 15 Januari 2025. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan tim kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP terkait. Pada pembahasan ini dilakukan update atas realisasi pengendalian pada *form* pemantauan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko serta laporan SPIP triwulan IV 2024
 - 6) Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Pelaporan SPIP Terintegrasi (SILASTRI) Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 Februari 2025 melalui media *zoom meeting* yang diikuti oleh tim satuan tugas SPIP Ditjen PDSPKP.
- k. Penyusunan Laporan Pengelolaan Kinerja Organisasi lingkup Ditjen PDSPKP

Kegiatan pengelolaan kinerja organisasi dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut,

- 1) Evaluasi Rencana Aksi Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun 2024 pada tanggal 6 Januari 2025. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Pengisian Evaluasi Rencana Aksi Level 2. Periode Triwulan IV tahun 2024



Gambar 61. Kegiatan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Level 2 lingkup Ditjen PDSPKP

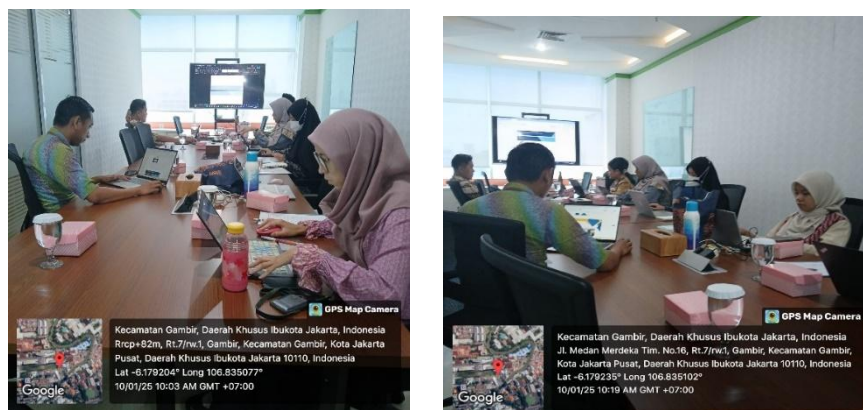
- 2) Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2024 pada tanggal 8 Januari 2025. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka Pengukuran Capaian

Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2024 sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan



Gambar 62. Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP

- 3) Rapat penyusunan Draft Laporan Kinerja (Lkj) Level 1 Lingkup Ditjen PDPSKP Periode Triwulan IV tahun 2024 pada 10 Januari 2025. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka penyusunan LKj Level 1 lingkup Ditjen PDSPKP Periode triwulan IV tahun 2024.



Gambar 63. Rapat Penyusunan Draft Laporan Kinerja (Lkj) Level 1 Lingkup Ditjen PDPSKP

- 4) Rapat Verifikasi Capaian Kinerja Level 2 Lingkup Ditjen PDSPKP Periode TW IV Tahun 2024 pada 17 Januari 2025. Tujuan kegiatan

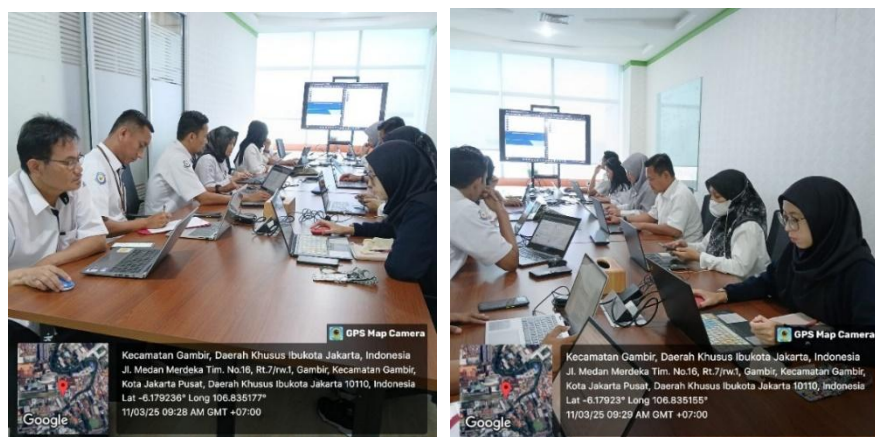
verifikasi kinerja adalah untuk memvalidasi setiap capaian kinerja agar dilengkapi dengan data yang memadai.

- 5) Pengisian Capaian Kinerja dan Anggaran Periode Triwulan IV Tahun 2024 pada Aplikasi Emonev Bappenas pada 21 Januari 2025.



Gambar 64. Kegiatan Pengisian Capaian Kinerja dan Anggaran Periode Triwulan IV Tahun 2024 pada Aplikasi Emonev Bappenas

- 6) Rapat penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Jenderal, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025. Rapat bertujuan menindaklanjuti surat Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor T.72/ITJ/HP.330/II/2025 tanggal 26 Februari 2025 perihal Hasil Reviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Tahun 2024



Gambar 65. Kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Jenderal

1. Pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP
Beberapa kegiatan pengelolaan BMN dan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Rapat penilaian BMN berupa Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru tanggal 13 Januari 2025 oleh tim penilai Kementerian Keuangan RI c.q. KPKNL Jakarta II. Rapat dihadiri oleh tim penilai KPKNL Jakarta II, perwakilan Direktorat Pemasaran, dan tim kerja pengelolaan BMN dan PBJ – Setditjen PDSPKP
 - 2) Rapat pembahasan penyelesaian piutang PT Perikanan Indonesia melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) – Kementerian Keuangan RI di Ruang Rapat Discuss, Raiser Ikan Hias Cibinong tanggal 24 Januari 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ dan dihadiri oleh perwakilan Biro Keuangan dan BMN – Setjen KKP, perwakilan Inspektorat IV – Inspektorat Jenderal KKP, perwakilan Direktorat Pemasaran – Ditjen PDSPKP, Tim Kerja Keuangan dan Pengendalian Internal – Setditjen PDSPKP, dan tim kerja hukum – Setditjen PDSPKP;



Gambar 66. Rapat Pembahasan Piutang PT Perindo atas Pemanfaatan BMN PIM Muara Baru Bersama Biro Keuangan dan Inspektorat IV KKP

- 3) Pertemuan terkait dengan pembahasan skema pemanfaatan BMN berupa *Cold storage* 2000 ton dan 1000 ton, serta pembangunan *cold*

storage melalui mekanisme Bangun Guna Serah (BGS) pada tanggal 14 Februari 2025. Rapat dihadiri oleh Kepala KPKNL Jakarta II – Kementerian Keuangan RI, Biro Keuangan dan BMN KKP, Biro Umum dan PBJ KKP, Kepala BBP3KP, dan Tim Satgas Pengelolaan Kawasan *Cold storage* Muara Baru;



Gambar 67. Rapat Pembahasan Pemanfaatan BMN Cold storage Muara Baru bersama KPKNL Jkt II, Pengguna Barang KKP dan BBP3KP

- 4) Pembahasan Rencana Pemanfaatan *Space* Lantai 2 Gedung Pasar Ikan Modern Muara Baru untuk Resto Modern yang diselenggarakan melalui Video Konferensi *Zoom* pada tanggal 4 Maret 2025. Rapat dihadiri oleh perwakilan KPKNL Jakarta II, Direktorat Pemasaran, dan Tim Kerja Pengelolaan BMN dan PBJ – Setditjen PDSPKP;
- 5) Ditjen PDSPKP mengirimkan Nota Dinas Nomor 1108/DJPDSPKP.1/PL.720/III/2025 Pada tanggal 13 Maret 2025, Sekretaris perihal Permohonan Reviu Sewa Gedung Perkantoran PIM Muara Baru. Permohonan reviu ini menindaklanjuti permohonan sewa dari Koperasi Arto Ulam Makmur, PT Smirna Intan Utama, dan CV Solutee Semangat Internasional untuk pemanfaatan ruangan indoor lantai 2 Pasar Ikan Modern Muara Baru.
- 6) Pada tanggal 14 Maret 2025, Sekretaris Ditjen DPSPKP mengirimkan surat Nomor B.3183/DJPDSPKP.1/PL.750/III/2025 kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta dengan Tembusan kepada Direktur Jenderal PDSPKP, Sekretaris Daerah DKI

Jakarta, dan PD Pembangunan Sarana Jaya perihal Berita Acara Serah Terima Hibah PIH Pejompongan. Tujuan dari surat ini adalah menyampaikan dan untuk mendapatkan masukan dan koreksi bersama perihal *draft* Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah dan Naskah Perjajian Hibah PIH Pejompongan

- 7) Pelaksanaan rapat Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 9 dan 10 Januari 2025. Kegiatan bertujuan untuk melakukan finalisasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2024 pada Aplikasi SiRUP, finalisasi pencatatan non tender dan swakelola di LPSE (AMEL) Tahun Anggaran 2024, dan penyelesaian status paket E-Purchasing Tahun 2024;
- 8) Pelaksanaan rapat Penginputan RUP Tahun 2025 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 22 s/d 24 Januari 2025. Kegiatan bertujuan untuk melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun 2025 pada Aplikasi SiRUP;
- 9) Pelaksanaan rapat finalisasi Updating RUP Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 13 Maret 2025. Kegiatan bertujuan untuk melakukan finalisasi Updating Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2025 pasca efisiensi pada Aplikasi SiRUP



Gambar 68. Finalisasi Updating RUP Tahun Anggaran 2025 lingkup Ditjen PDSPKP

m. Kegiatan Kerjasama lingkup Ditjen PDSPKP

Beberapa kegiatan berkaitan dengan Kerjasama lingkup Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung implementasi birokrasi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kesepakatan kerjasama internasional lingkup Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
 - a) Rapat Persiapan Kegiatan *US Embassy MMAF Fisheries Investment Through Select USA* tanggal 7 Januari 2025;
 - b) Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi *Ministry of Climate Change and Environment* (MOCCA) Persatuan Emirat Arab ke Indonesia tanggal 9 Januari 2025;
 - c) Rapat Evaluasi *MoU on Marine and Fisheries* RI-Persatuan Emirat Arab tanggal 20 Januari 2025;
 - d) Rapat Evaluasi Pelaksanaan *Memorandum of Understanding on Marine and Fisheries Cooperation* RI-Persatuan Emirat Arab tanggal 24 Januari 2025;
 - e) Rapat Pembahasan Draft PoA Implementasi *MoU on Fisheries and Aquaculture* RI-Mesir tanggal 3 Februari 2025;
 - f) Rapat Interkem Pembahasan *Counterdraft MoU on Fisheries and Aquaculture* RI-Turki tanggal 6 Februari 2025;
 - g) Pelaksanaan *Steering Committee Meeting* tanggal 6 Februari 2025;
 - h) Rapat Finalisasi *MoU on Fisheries and Aquaculture* Indonesia-Turki tanggal 7 Februari 2025;
 - i) Rapat Finalisasi *Deliverables* Kunjungan Presiden Turki ke Indonesia tanggal 10 Februari 2025;
 - j) Rapat Pembahasan *Draft Strategic Plan for Ensuring Food Security in OIC Member* tanggal 13 Februari 2025;
 - k) Rapat Pembahasan Usulan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan *Official Development Assistance* (ODA) Korea tanggal 26 Februari 2025;

- l) Rapat pembahasan Brazil, Russia, India, and China (BRICS) *Intergovernmental Organization* tanggal 11 Maret 2025;
 - m) Rapat Pembahasan *Project Global Mariculture Value Chain* dengan FAO tanggal 14 Maret 2025;
 - n) Rapat Perkembangan Perjanjian Subsidi Perikanan tanggal 18 Maret 2025;
 - o) Rapat Pembahasan *Counterdraft MoU on Fisheries and Aquaculture* RI-Hongaria tanggal 20 Maret 2025
- 2) Kesepakatan kerjasama antarlembaga lingkup Ditjen PDSPKP diantaranya sebagai berikut:
- a) Pembahasan rencana implementasi SRG dan rencana perpanjangan kerja sama;
 - b) Pembahasan implementasi SRG dalam rangka antisipasi dampak pemberlakuan tarif Impor USA;
 - c) Pembahasan rencana pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Kulonprogo, DI Yogyakarta tanggal 21 Januari 2025;
 - d) Sosialisasi Gemarikan pada peringatan HUT PERWARI tanggal 20 Maret 2025 di Jakarta;
 - e) Fasilitasi Bazar produk perikanan pada peringatan HUT PERWARI tanggal 20-21 Maret 2025.
 - f) Pertukaran data realisasi kredit UMi sektor KP dari PT PNM. Data diberikan secara berkala setiap bulan. Sampai dengan TW I realisasi kredit UMKM ultra mikro sebesar Rp.253.440.000.000 (dua ratus lima puluh tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja implementasi birokrasi sebesar Rp 126.396.287.000,- sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp 17.741.765.000,- atau setara dengan 14,04%.

3. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp255.259.620.000,- yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dan PNBPN. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir dan efisiensi anggaran sebesar Rp142.079.145.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp113.180.475.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp27.851.059.725,- atau setara dengan 10,91% terhadap total pagu anggaran awal atau 24,61% terhadap pagu anggaran pagu efektif.

Tabel 10. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Tahun 2024 (Dalam Rp.000)

No	Kewenangan	Pagu Anggaran (Rp)	AA/Blokir	Pagu Efektif	Realisasi Anggaran	% Terhadap Pagu Awal	% Terhadap Pagu Efektif
1	Pusat	207.857.416	125.212.945	82.644.471	20.641.359	9,93%	24,98%
2	UPT	42.613.397	12.077.393	30.536.004	7.209.700	16,92%	23,61%
3	Tugas Pembantuan	4.788.807	4.788.807	-	-	0%	0%
Total		255.259.620	142.079.145	113.180.475	27.851.060	10,91%	24,61%

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu 9 April 2025

Tabel 11. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2024 (Dalam Rp.000)

No	Nama Kegiatan	Pagu	Jumlah Diblok/AA	Pagu Anggaran Efektif	Realisasi	% Realisasi Terhadap Pagu Awal	% Realisasi Terhadap Pagu Efektif
1	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	5.856.950	5.174.337	682.613	366.894	6,26	53,75
2	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	86.845.450	73.980.540	12.864.910	729.227	0,84	5,67
3	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	16.829.050	15.262.197	1.566.853	249.579	1,48	15,93
4	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	12.619.000	10.796.253	1.822.747	81.018	0,64	4,44
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	127.809.094	31.867.363	95.941.731	26.339.693	20,61	27,45
6	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	5.300.076	4.998.455	301.621.000	84.649.474	1,60	28,06
	Total	255.259.620	142.079.145	113.180.475	27.851.060	10,91	24,61

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu 9 April 2025

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja. Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada triwulan I tahun 2025 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 77,97.

2. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP tahun 2024, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Tabel 12. Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Rumput Laut	Menurunnya harga rumput laut di pasar global baik pada rumput laut kering dan rumput laut olahan serta adanya persepsi publik terkait kandungan rumput laut yang bisa meningkatkan inflamasi yang bisa jadi mempengaruhi daya jual produk olahan rumput laut. Selain itu pertumbuhan ragam produk <i>hydrocolloid</i> juga mempengaruhi daya saing produk karaginan dengan produk lainnya.	Melakukan upaya promosi/kampanye terkait amannya produk olahan berbasis rumput laut terutama yang ditujukan untuk produk konsumsi.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada tahun 2024 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024 antara lain :

Tabel 13. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Tahun 2024
1	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	- Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya; - Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan Anti-dumping.	Indikator Kinerja Nilai Ekspor Hasil Perikanan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Level 1 Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025, sehingga tidak ada kegiatan yang secara khusus dapat menjawab rekomendasi atas Indikator Kinerja tersebut pada triwulan I 2025
2	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program	Koordinasi dan sinergi kegiatan dengan lembaga keuangan Bank, Non Bank dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan akses pembiayaan untuk mendukung program prioritas KKP, serta optimalisasi pemanfaatan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk	Indikator Kinerja Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Level 1 Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025, sehingga tidak ada kegiatan yang secara khusus dapat menjawab rekomendasi atas Indikator Kinerja tersebut pada triwulan I 2025

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Tahun 2024
		dapat difasilitasi kredit program. • Edukasi, sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi akses pembiayaan. • Identifikasi dan verifikasi calon debitur potensial dalam rangka persiapan kegiatan fasilitasi akses permodalan • Upaya pembentukan klaster pembiayaan di Kawasan Kampung Nelayan Modern, Kampung Budidaya dan sentra pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan	
3	Angka Konsumsi Ikan	• Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan konsumsi ikan • Melaksanakan kampanye protein ikan dan gerakan memasyarakatkan makan ikan dalam mendukung program	Indikator Kinerja Angka Konsumsi Ikan tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Level 1 Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025, sehingga tidak ada kegiatan yang secara khusus dapat menjawab rekomendasi atas Indikator Kinerja tersebut pada triwulan I 2025

No	Indikator Kinerja	Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan IV Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Tahun 2024
		makan bergizi melalui berbagai media • Finalisasi data AKI nasional tahun 2024	
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	• Melaksanakan koordinasi terkait pengisian target/capaian <i>output</i> /pelaksanaan kegiatan/anggaran • Melakukan pemantauan dan evaluasi atas rencana pelaksanaan anggaran	Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran tidak lagi menjadi Indikator Kinerja Level 1 Ditjen PDSPKP pada Tahun 2025, sehingga tidak ada kegiatan yang secara khusus dapat menjawab rekomendasi atas Indikator Kinerja tersebut pada triwulan I 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Budi Sulistiyo**

Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Budi Sulistiyo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing	1.	Nilai Ekspor Rumput Laut (USD Miliar)	0,574
		2.	Nilai Ekspor Produk Perikanan Lainnya (USD Miliar)	5,676
		3.	Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri (Rp Triliun)	310,51
		4.	Persentase UMKM Pengolahan Produk KP Naik Kelas (%)	5
2.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen PDSPKP	5.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PDSPKP (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri		
1	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	86.845.450.000
2	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	16.829.050.000
3	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	12.619.000.000
4	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	5.856.950.000
5	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	5.300.076.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen PDSPKP	127.809.094.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025		255.259.620.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Budi Sulistiyo